



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO**

***LOCAL GOVERNMENT POLICY IN THE MANAGEMENT OF
TRADITIONAL MARKETS IN PROBOLINGGO CITY***

TESIS

Oleh

Pungky Praja Jatmika, S.IP

NIM : 140920101002

**KONSENTRASI ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirrohim, sujud syukur kepadamu wahai Allah SWT yang Maha Agung nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah engkau jadikan saya manusia yang senantiasa berpikir dan berilmu serta sabar dalam menjalani kehidupan. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta, tersayang dan terkasih dalam kehidupan saya yang selalu menyemangati, mendoakan keberhasilan dan mendukung dalam terselesainya tesis ini :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Djatmiko dan Ibu Ernawati, yang senantiasa dengan tulus memberikan doa dan kasih sayang yang tidak bercela kepadaku dan yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap doa-Nya, terimakasih untuk semua pengorbanan, cinta dan kasihnya.
2. Istriku Ratna Sulistyowati, S.Pd yang selalu mendoakan setiap langkahku agar dipermudah dan diberi petunjuk oleh Allah SWT, terimakasih untuk semua cinta dan kasihnya.
3. Guru-guruku yang telah mengajarkanku dan berbagi ilmu tentang Ilmu Pengetahuan.
4. Sahabat-sahabat yang tidak pernah bosan meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan berbagi ilmu.
5. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“ Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), maka tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah engkau berharap ”.¹

“ Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia ”.²

¹ Q.S Al- Insyirah 6-8

² Nelson Mandela

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pungky Praja Jatmika, S.IP
NIM : 140920101002
Jurusan : Magister Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo”. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2017

Yang menyatakan,

Pungky Praja jatmika, S.IP

NIM 140920101002

TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO**

***LOCAL GOVERNMENT POLICY IN THE MANAGEMENT OF
TRADITIONAL MARKETS IN PROBOLINGGO CITY***

Oleh

Pungky Praja Jatmika, S.IP
NIM 140920101002

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 19580810 198702 1 002

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Edy Wahyudi, M.M
NIP. 19750825 200212 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul " Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo ", telah disetujui pada :

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 19580810 198702 1 002

Dr. Edy Wahyudi, M.M
NIP. 19750825 200212 1 002

PENGESAHAN

Tesis berjudul "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo", karya Pungky Praja Jatmika, S.IP telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Anggota I,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP. 19600219 198702 1 001

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 19580810 198702 1 002

Anggota II,

Anggota III,

Dr. Edy Wahyudi, M.M
NIP. 19750825 200212 1 002

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, SE, M.Si
NIP. 19790220 200212 2 001

Anggota IV,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP. 19680229 199803 1 001

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo; Pungky Praja Jatmika, S.IP, 140920101002; 2017: 158 halaman; Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kondisi pasar tradisional yang ada di kota Probolinggo dianggap tidak nyaman untuk pedagang dan para konsumen. Fisik bangunan pasar kurang sudah rusak, kurangnya tempat sampah, saluran limbah yang telah tertutup, kurangnya pencahayaan dan banyaknya pedagang yang berjualan di lorong karena tidak mendapatkan bedak. Keberadaan pedagang tersebut mengganggu kelancaran access distribusi dan lalulintas pengunjung/pembeli. Hal ini tentu mengurangi daya tarik pengunjung untuk berbelanja di pasar tradisional.

Perparkiran di sekitar pasar juga telah mengakibatkan kemacetan kendaraan yang melintas maupun kendaraan milik pedagang dan pebelanja yang menuju / meninggalkan pasar.

Kondisi pasar di atas, khususnya pasar Baru kota Probolinggo perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak khususnya stakeholder pasar dan pemerintah daerah sebagai pengelola. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memberdayakan pasar Baru sebagai pasar tradisional yang kompetitif, namun hasilnya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada secara nyata.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui sejauh mana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam Pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Probolinggo, (2) Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, (3) Memberikan alternatif kebijakan sebagai solusi pengelolaan pasar tradisional kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan karakteristik sosial pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Selain itu, penelitian jenis ini dikenal sebagai jenis riset etnografis, yaitu teknik riset dengan

menyertakan observasi dan juga wawancara langsung dengan partisipan yang diteliti.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemerintah daerah kota Probolinggo masih perlu meningkatkan perannya dalam peningkatan pengelolaan pasar Baru mengingat (1) Adanya urgensi peningkatan kebersihan lingkungan pasar, (2) Adanya urgensi penataan ulang perparkiran untuk mengatasi kemacetan, (3) Adanya urgensi revitalisasi fisik bangunan sehingga tampak fisik gedung layaknya pasar modern, (4) Adanya urgensi revitalisasi arsitektur tata letak pasar yang komprehensif.

Dengan adanya beberapa temuan tersebut, tampaknya penting untuk diberikan rekomendasi sebagai berikut (1) Hendaknya pemerintah kota Probolinggo segera melakukan revitalisasi bangunan secara menyeluruh, (2) Hendaknya revitalisasi fisik bangunan pasar dilakukan secara umum sehingga dapat menjadikan performan pasar tradisional pasar Baru memiliki profil sebagaimana pasar swalayan modern, (3) Hendaknya dalam penataan ulang, agar Pemerintah Kota Probolinggo memberikan ruang parkir yang cukup, (4) Diharapkan adanya sistem penataan interior yang komprehensif sebagaimana pasar modern dengan tetap tidak membebani kepada pedagang demi kesejahteraan semua pihak.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Pasar Tradisional

SUMMARY

LOCAL GOVERNMENT POLICY IN THE MANAGEMENT OF TRADITIONAL MARKET IN PROBOLINGGO CITY

Condition of traditional markets in the city of Probolinggo are considered uncomfortable for traders and consumers. The physical buildings have damaged, lack of trash, sewage that has been closed, lack of lighting and the number of traders who are selling in the hall because they do not get stall. The presence of such traders interfere the smoothness of distribution access and traffic of visitors / buyers. This certainly reduces the attractiveness of visitors to come for shopping in traditional markets.

Parking around the market has also resulted in traffic congestion as well as vehicles belonging to traders and shoppers that coming / leaving the market.

The market condition as illustrated above, especially in pasar Baru market of Probolinggo city need to get more attention from multiple parties especially market stakeholders and specially from local government as manager. Although local governments have made efforts to empower pasar Baru as a competitive traditional market, the results have not been able to resolve the real problems.

The objectives of this research are: (1) To know what kinds of policy have been taken by Probolinggo local government in traditional market management in Probolinggo municipality, (2) To know the efforts that have been done by local government of Probolinggo city, (3) To give local government of Probolinggo municipality alternative policy as solution in managing the traditional markets.

This research is qualitative research. This methode is suitable with social characteristics of traders and traditional market visitors. In addition, this methodes of research is well known as a type of ethnographic research.

This research found that the local government of Probolinggo city still need to increase its attention in the improvement of pasar Baru management. These attentions should consider (1) The urgency to increase the cleanliness of the market environment, (2) The urgency of parking rearrangement to overcome the

congestion, (3) The urgency of physical revitalization building so that the physical appearance of the building as a modern market, (4) The urgency of revitalization of comprehensive market layout architecture.

Based on these findings, it seems important to give the following recommendations: (1) Probolinggo city government should immediately revitalize the whole building, (2) Physical revitalization of market buildings should be established wholly so as to make traditional market performance has a profile as modern market, (3) In doing building revitalization and area rearrangement, the Probolinggo municipal government shall provide adequate parking space, (4) It is expected that there will be a comprehensive interior layout system likely the modern market but will not burden the merchant for the sake of the welfare of all parties.

Keywords : Publik Policy, Local Government, Management, Traditional Markets

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas kepercayaan, kesabaran dan telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan untuk penyelesaian tesis ini;
4. Dr. Edy Wahyudi, M.M selaku Dosen Pembimbing Anggota, atas kepercayaan, kesabaran dan masukan serta sumbangsih pemikiran yang tak ternilai dalam proses pembimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
5. Keluargaku Ayah, Ibu dan Istriku, terimakasih selalu menjadi motivasi.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Teman-teman dari Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya angkatan 2014 atas rasa kekeluargaan yang diberikan selama menjalani masa studi di Universitas Jember sehingga menjadi pemanis dalam menjalani proses pendidikan.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan penulisan tesis ini, penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, 18 Maret 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN / SUMMARY	viii
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional	16
2.2. Definisi Pasar	17
2.2.1. Sejarah Pasar Tradisional	19
2.2.2. Eksistensi Pasar Tradisional	20
2.2.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional	22

2.2.4. Sejarah Masuknya Pasar Modern ke Indonesia	26
2.3. Regulasi Pemerintah Pusat tentang Pasar	28
2.4. Regulasi Pemerintah Daerah tentang Pasar	28
2.5. Pengelola Pasar	30
2.6. Kebijakan Publik dalam Pengelolaan	
Pasar Tradisional	32
2.7. New Public Management dalam Pengelolaan	
Pasar Tradisional	37
2.8. Pemerintah Daerah	40
2.9. Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam	
Pengelolaan pasar Tradisional	43
2.10. Pasar Baru Kota Probolinggo	45
2.11. Penelitian Terdahulu	46
2.11.1. Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Depok	46
2.11.2. Studi Kasus Pasar Tradisional Beringharjo	
Jogjakarta	47
2.11.3. Studi Kasus Pasar Wonokromo Surabaya	48
2.12. Penelitian tentang Pengelolaan Pasar Tradisional	
di Negara Lain	50
2.12.1. Pengelolaan Pasar Tradisional di Inggris	50
2.12.2. Pengelolaan Pasar Tradisional di Korea	51
2.13. Definisi Konseptual	53
2.13.1. Kebijakan	53
2.13.2. Pemerintah Daerah	54
2.13.3. Pengelolaan	57
2.13.4. Pasar Tradisional	57
2.14. Kerangka Konseptual	58
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	59
3.2. Tempat Penelitian	59
3.3. Alasan Pemilihan Tempat Penelitian	59

3.4. Jenis dan Sumber Data	61
3.5. Subyek dan Obyek Penelitian	63
3.6. Teknik Pengumpulan Data	64
3.7. Teknik Analisis Data	67
3.8. Pengujian Kredibilitas Data Hasil Penelitian	69
3.9. Alur Penelitian	72

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian	73
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Probolinggo	73
4.1.2. Visi dan Misi Kota Probolinggo	76
4.1.3. Kondisi Geografis Wilayah Kota Probolinggo	78
4.1.4. Pembagian Wilayah Kota Probolinggo	80
4.1.5. Struktur Demografi Kota Probolinggo	82
4.1.6. Keberadaan Pasar Tradisional di Kota Probolinggo ...	86
4.1.7. Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam	
Pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo	88
4.1.7.1. Penyedia Sarana Prasarana	90
4.1.7.2. Pembentukan Kelembagaan	91
4.1.7.3. Pengelolaan Pendapatan Pasar	95
4.1.7.4. Merevitalisasi Non Fisik Pasar Tradisional ..	97
4.1.7.5. Merevitalisasi Fisik Pasar Tradisional	98
4.2. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian	99
4.2.1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	99
4.2.1.1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam	
Penyediaan Sarana Prasarana Pasar Baru	
Kota Probolinggo	99
4.2.1.2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam	
Pembentukan Kelembagaan bagi Pedagang Pasar Baru	
Kota Probolinggo	101
4.2.1.3. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam	
Pengelolaan Pendapatan Pasar Baru	

Kota Probolinggo	104
4.2.1.4. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam Pemberdayaan Pasar Baru Sebagai Pasar Tradisional di Kota Probolinggo	110
4.2.2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	120
4.2.2.1. Public Policy dalam Pengelolaan pasar baru Kota Probolinggo	120
4.2.2.2. New Public Management dalam pengelolaan pasar baru Kota Probolinggo	125
4.2.3. Kebijakan Alternatif sebagai solusi pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Probolinggo	136
4.2.3.1. Renovasi Fisik Bangunan	137
4.2.3.2. Penataan dan Penertiban Perparkiran	140
4.2.3.3. Penertiban Pedagang diluar pasar	141
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	148
5.1. Kesimpulan	148
5.2.Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	153

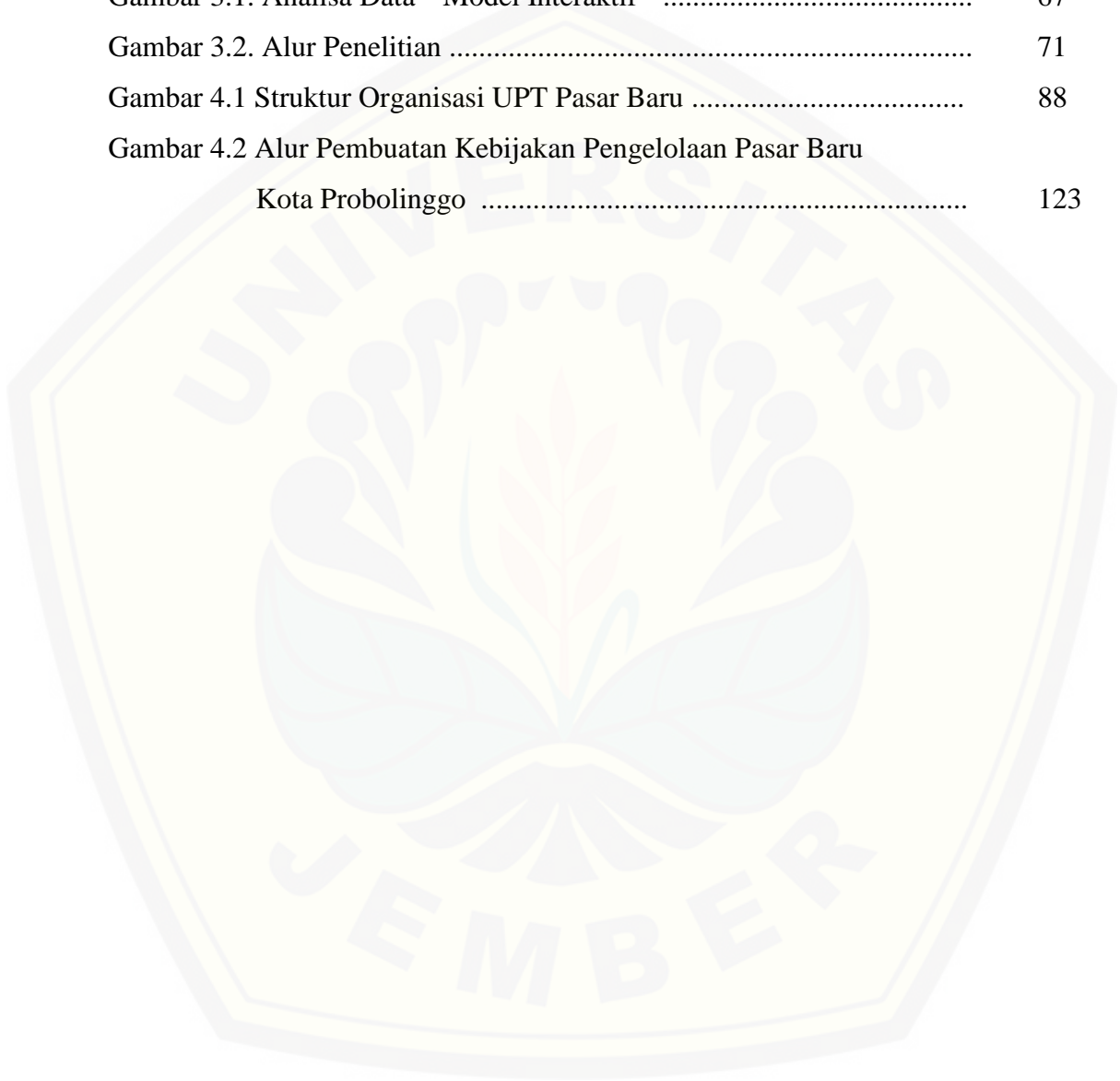
Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1. Luas, Jumlah Bedak dan Los Pasar Baru	5
Tabel 1.2. Jumlah Pedagang dan Jenis Barang Dagangan di Pasar Baru ..	5
Tabel 4.1. Daftar Sejarah Nama Walikota Probolinggo	75
Tabel 4.2. Penggunaan Lahan Kota Probolinggo	79
Tabel 4.3. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo	80
Tabel 4.4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan	81
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2014.....	82
Tabel 4.6. Perbandingan Distribusi Penduduk Kota Probolinggo Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2013	83
Tabel 4.7. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2014	84
Tabel 4.8. Laporan Penerimaan PAD UPT Pasar Baru Tahun 2016 Kota Probolinggo (Periode Januari - Maret)	104
Tabel 4.9. Laporan Penerimaan PAD UPT Pasar Baru Tahun 2016 Kota Probolinggo (Periode April – Juli)	104
Tabel 4.10. Target Penerimaan PAD Pelayanan Pasar UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Tahun 2016	105
Tabel 4.11. Realisasi Pendapatan Parkir UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Tahun 2016 (Periode Januari - Maret)	105
Tabel 4.12. Realisasi Pendapatan Parkir UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Tahun 2016 (Periode April - Juli)	106
Tabel 4.13. Target Penerimaan PAD Dari Retribusi Parkir UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Tahun 2016	107
Tabel 4.14. Target Penerimaan PAD Dari Retribusi Kebersihan UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Tahun 2016	107
Tabel 4.15. Realisasi Pendapatan Retribusi Kebersihan UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Tahun 2016 (Periode Januari-Maret)	108
Tabel 4.16. Realisasi Pendapatan Retribusi Kebersihan UPT Pasar Baru	

Kota Probolinggo Tahun 2016 (Periode April - Juli)	108
Tabel 4.17. Jumlah Perolehan Pendapatan UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Dari 3 Komponen Sumber Penerimaan s/d Bulan Juli 2016	108
Tabel 4.18. Biaya Kegiatan Revitalisasi Pasar Baru Tahun 2012 (Sumber Dana Dari Yayasan Danamon Peduli)	116
Tabel 4.19. Biaya Kegiatan Revitalisasi Pasar Baru Tahun 2012 (Sumber Dana Dari Pemerintah Kota Probolinggo)	117
Tabel 4.20. Biaya Kegiatan Revitalisasi Fisik Pasar Baru Tahun 2012 (Sumber Dana dari YDP)	118
Tabel 4.21. Biaya Kegiatan Revitalisasi Fisik Pasar Baru Tahun 2012 (Sumber Dana dari Pemerintah Kota Probolinggo)	119

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Kerangka Konseptual	57
Gambar 3.1. Analisa Data “ Model Interaktif “	67
Gambar 3.2. Alur Penelitian	71
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Pasar Baru	88
Gambar 4.2 Alur Pembuatan Kebijakan Pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo	123



Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Panduan Wawancara Dengan Dinas & Pengelola Pasar	153
Lampiran 2. Panduan Wawancara Kondisi Pasar Menurut Pedagang	155
Lampiran 3. Panduan Wawancara Kondisi Pasar Menurut Pembeli, Pelanggan dan Pengunjung	156
Lampiran 4. Panduan Wawancara Kondisi Pasar Menurut Tokoh Masyarakat Atau Pemerhati	157
Lampiran 5. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Pasar Modern	
Lampiran 6. PERMENDAG No. 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Pasar Modern	
Lampiran 7. PERDA No. 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern	
Lampiran 8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Probolinggo Tahun 2016	
Lampiran 9. Struktur Organisasi UPT Pasar Baru Kota Probolinggo	
Lampiran 10. Keputusan Kepala UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Tentang Paguyuban Pedagang Pasar Baru	
Lampiran 11. Keputusan Kepala UPT Pasar Baru Tentang Susunan Keanggotaan Pengurus Paguyuban Pasar Baru	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pasar tradisional semakin ditinggalkan masyarakat. Hal ini dikarenakan menjamurnya produk-produk modern. Oleh karenanya, jika tidak ada kebijakan pemerintah yang fair dalam dinamika usaha di pasar tradisional, besar kemungkinan pasar tradisional akan punah. Jika demikian yang terjadi maka akibatnya masyarakat yang menggantungkan ekonomi dan kebutuhannya di pasar tradisional akan kehilangan mata pencaharian mereka. Fenomena tersebut sudah terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Fenomena itu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia yang telah menyiapkan diri masuk dalam bagian pasar bebas.

Jika pasar modern ditinjau dari komoditas dagangannya memang tidak jauh berbeda meskipun secara kualitas mungkin jauh lebih baik di pasar modern, hanya saja pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*). Dari unsur bangunan fisik pasar modern lebih permanen, relatif besar dan tertata, yang berbeda dengan pasar tradisional yang biasanya hanya terdiri dari lapak-lapak. Di pasar modern, jenis pelayanan yang dilakukan oleh penjual dapat berbentuk pelayanan secara mandiri oleh pembeli (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Selain itu jenis barang yang dijual tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional, namun dari sisi kemasan, jumlah dan jenis barang lebih beragam.

Walaupun di daerah-daerah sudah menjamur pasar modern, tetapi harapan masyarakat masih tertumpu adanya regulasi kebijakan pemerintah yang tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan, seperti halnya mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode analisis kebijakan (*policy analysis method*), sehingga hasil studi dapat menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam mem-formulasikan kebijakan yang akan dihasilkan.

Ditingkat propinsi, perhatian pemerintah Propinsi Jawa Timur terhadap eksistensi pasar tradisional telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Dalam Perda tersebut diatur tentang wajibnya pengelola Pasar Modern untuk menjalin kemitraan dengan pedagang kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional.

Lebih dari itu bahkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah melakukan upaya penguatan keberadaan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern, dengan menyelenggarakan lomba Pengelolaan Pasar Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Dalam upaya penguatan tersebut diperoleh hasil pemenang lomba dengan masing-masing pemenang diberikan hadiah berupa Trophy dan uang tunai yang bersumber dari anggaran pemerintah propinsi sebagai bantuan kepada pelaksana pengelola pasar di desa masing-masing.

Dibandingkan dengan daerah lain sebagaimana diuraikan di atas, pengelolaan pasar di Kota Probolinggo belum ada suatu sistem pengelolaan pasar tradisional yang baik sehingga berdampak pada ketidakberdayaan para pelaku usaha dipasar tradisional akibat dari semakin kuatnya pengembangan pasar modern. Pengembangan pasar modern di Kota Probolinggo sangat berpengaruh terhadap pasar tradisional. Hal ini karena pasar modern menyediakan fasilitas yang nyaman, area yang bersih dan penataan zonasi yang baik sehingga pembeli sangat mudah menemukan berbagai kebutuhannya. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan pasar tradisional yang justru sebaliknya.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada awal bulan Januari 2016, didapati bahwa kondisi lokasi khususnya pasar Baru dalam keadaan kumuh dan semrawut. Sebagai pasar tradisional, jenis barang dagangan yang dipasarkan di Pasar Baru Kota Probolinggo meliputi barang kebutuhan pokok masyarakat meliputi bahan makanan (sayur mayur, buah-buahan, makanan ringan, bumbu dapur, ikan, dan daging), gerabah, pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya. Tempat yang digunakan untuk mendukung aktivitas jual beli di Pasar Baru tersedia bedak atau los yang dimanfaatkan oleh penjual untuk menggelar barang dagangannya. Luas bedak atau los yang dimiliki oleh pedagang berbeda satu sama lainnya tergantung pada kemampuan finansial serta kebutuhan masing-masing pedagang. Bedak atau los yang dimiliki oleh pedagang berupa bangunan permanen maupun semi permanen (triplek atau bambu). Lantai pasar sudah mengalami perkerasan,

dengan perkerasan semen dengan atap berupa genteng dan seng tanpa dibatasi oleh plafon.

Penempatan bedak di Pasar Baru cenderung diklasifikasikan berdasarkan jenis barang dagangan. Pedagang ikan menempati blok yang sama atau membentuk kluster dengan pedagang ikan lainnya, begitu juga pedagang sayur dan buahan-buahan. Pedagang yang berjumlah sedikit seperti pedagang pakaian, pedagang bunga maupun tempat penyepuhan emas cenderung menyebar dan tidak membentuk cluster tersendiri.

Selain dari data yang telah diuraikan di atas, yang menjadi urgensi dari dilakukannya penelitian di pasar tradisional ini adalah eksistensi pasar tradisional khususnya pasar Baru Kota Probolinggo merupakan pasar tradisional terbesar yang terletak di tengah kota dan menjadi tumpuhan masyarakat dalam berbelanja karena letak yang sangat strategis yaitu berada pada jalur protokol dengan akses yang sangat mudah.

Pasar Baru Kota Probolinggo berada pada lokasi yang sangat strategis karena diapit oleh 4 (empat) ruas jalan yaitu : Jl. Panglima Sudirman, Jl. Siaman, Jl. Pahlawan serta Jl. Tjut Nyak Dien (atau dikenal masyarakat dengan nama Jl. Niaga), dimana Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Pahlawan merupakan ruas jalan protokol di Kota Probolinggo. Pasar baru Kota Probolinggo ini termasuk dalam lingkungan Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Adapun batas wilayah Pasar Baru Kota Probolinggo adalah :

- Sebelah Utara : Kelurahan Mangunharjo

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari Kulon
- Sebelah Timur : Kelurahan Jati
- Sebelah Barat : Kelurahan Tisnonegaran

Luas lahan Pasar Baru secara keseluruhan adalah 6.534,7 m², dengan jumlah toko/bedak/kios dan los sebagaimana tampak pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Luas, Jumlah Bedak dan Los Pasar Baru

No.	Nama Pasar	Luas (m ²)	Bedak (unit)	Los (Unit)
1	Pasar Baru	4.294	40	16
2	Trobosan	1.404,7	8	-
3	Wedusan	836	30	2
Jumlah		6.534,7	78	18

Sumber : DPPKA Kota Probolinggo

Pasar baru Kota Probolinggo sebagai pasar tradisional sangat mendesak untuk memperoleh perhatian dari pemerintah daerah Kota Probolinggo karena selain kondisi lokasi yang kumuh dan berada di lokasi yang strategis sebagaimana disebutkan di atas, berikut ini data pedagang di pasar baru Kota Probolinggo.

Tabel 1.2. Jumlah Pedagang dan Jenis Barang Dagangan di Pasar Baru

No.	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang					Jumlah	%
		Pasar Baru	Trobosan	Wedusan	Jl. Niaga	Jl. Pangsud		
A	<i>Bahan Mentah dan Setengah Jadi</i>							
	Sayur-sayuran	58	0	10			68	12.6
	Ayam	27	0	7			34	6.3
	Daging	8	2	2	1	1	14	2.6
	Ikan segar	7	0	48			55	10.2
	Ikan kering dan terasi	4	1	2			7	1.3
	Buah-buahan	37	7	1			45	8.3

No.	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang					Jumlah	%
		Pasar Baru	Trobosan	Wedusan	Jl. Niaga	Jl. Pangsud		
	Bunga	1	0	0			1	0.2
	Tempe	5	0	4			9	1.7
	Tahu	9	2	7			18	3.3
	Slep daging				1		1	0.2
	Slep kelapa	3	0	0			3	0.6
	Pracangan	30	0	8	6	17	61	11.3
	Bumbu	9	0	3			12	2.2
	Rempah	5	0	0			5	0.9
	Garam	1	0	0			1	0.2
	Daging bebek	1	2	0			3	0.6
	Beras & beras jagung	4	22	0			26	4.8
	Krupuk, kripik dan rengginang	11	0	1			12	2.2
	Kelapa	10	0	3			13	2.4
	Lombok	13	0	2			15	2.8
	Telur	8	9	2			19	3.5
	Ayam Panggang	1	0	0			1	0.2
	Asam	2	0	0			2	0.4
	Ketupat	1	1	1			3	0.6
	Bahan Makanan Jadi							
	Nasi	8	0	3			11	2.0
	Kopi	5	0	3			8	1.5
	Kue	8	0	0			8	1.5
	Snack	2	1	0			3	0.6
	Sate	1	0	0			1	0.2
B	Jamu	4	1	1			6	1.1
	Lontong	2	0	0			2	0.4
	Tape	1	0	0			1	0.2
	Ketan	2	0	0			2	0.4
	Cao, Godir & Dawet	8	14	0			22	4.1
	Mie	1	0	0			1	0.2
	Barang Bukan Makanan							
	Gerabah dan anyaman	5	0	0	7		12	2.2
	Plastik	3	8	0			11	2.0
	Hiasan / asesoris	1	0	0			1	0.2
	Pakai dan sepatu	6	0	0			6	1.1
	Kemasan & Keranjang	3	0	1		1	5	0.9
	Kain	4	0	0		4	8	1.5
	Bhn Bangunan					1	1	0.2

No.	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang					Jumlah	%
		Pasar Baru	Trobosan	Wedusan	Jl. Niaga	Jl. Pangsud		
D	<i>Jasa</i>							
	Optical					1	1	0.2
	Warnet				1		1	0.2
	Wartel					1	1	0.2
	Bank					1	1	0.2
	Jumlah	319	70	109	16	27	541	100.0

Sumber : DPPKA Kota Probolinggo

Selain data awal sebagaimana pada uraian di atas, berikut ini fakta-fakta lainnya kondisi Pasar Baru Kota Probolinggo:

- Tidak mampu menampung pedagang di dalam pasar, akibatnya banyak pedagang yang berjualan di luar pasar, yaitu di trotoar dan sepanjang Jalan Niaga, Jalan Siaman, dan sebagian Jalan Panglima Sudirman serta Jalan Pahlawan. Dengan banyaknya pedagang yang berjualan di luar pasar mengakibatkan kualitas lingkungan pasar menjadi menurun.
- Pedagang yang berjualan dan menggelar dagangannya di jalan dan trotoar di sekitar pasar adalah pedagang kecil yang secara finansial tidak mampu mendapatkan kios berjualan didalam pasar.
- Sering terjadi kemacetan lalu lintas di jalan Panglima Sudirman dan jalan Pahlawan akibat penggunaan trotoar untuk PKL dan bahu jalan untuk parkir serta pemberhentian angkutan kota terutama pada jam sibuk.
- Kondisi parkir kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan becak di sekitar Pasar Baru berada di badan jalan dan bahu jalan, sehingga kondisi parkir tidak teratur dan menghambat arus lalu lintas di sekitar Pasar Baru.
- Zonasi penempatan jenis komoditas yang diperdagangkan belum menunjukkan zona yang jelas.

Dari segi kontribusi pendapatan pasar yang diperoleh dari kegiatan operasional pasar antara lain diperoleh dari penarikan pajak / retribusi yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang klasifikasi besarnya tarif yang meliputi :

a. Retribusi Pelayanan Pasar

- Kelas I Retribusi Pelayanan Pasar khusus kios / toko / bedak dengan tarif Rp. 400,-/m²/hari
- Kelas II Retribusi Pelayanan Pasar khusus kios / toko / bedak dengan tarif Rp. 300,-/m²/hari
- Kelas III Retribusi Pelayanan Pasar khusus kios / toko / bedak dengan tarif Rp. 250,-/m²/hari

b. Retribusi Pelayanan Pasar

- Kelas I Retribusi Pelayanan Pasar khusus los / halaman pelataran / penjajah dengan tarif Rp. 250,-/m²/hari
- Kelas II Retribusi Pelayanan Pasar khusus los / halaman pelataran / penjajah dengan tarif Rp. 250,-/m²/hari
- Kelas III Retribusi Pelayanan Pasar khusus los / halaman pelataran / penjajah dengan tarif Rp. 200,-/m²/hari

c. Retribusi Kebersihan Pasar

- Kelas I Retribusi Kebersihan Pasar khusus kios / toko / bedak dengan tarif Rp. 3.000,-/bulan
- Kelas II Retribusi Kebersihan Pasar khusus kios / toko / bedak dengan tarif Rp. 2.000,-/bulan
- Kelas III Retribusi Kebersihan Pasar khusus kios / toko / bedak dengan tarif Rp. 1.000,-/bulan

d. Retribusi Pelayanan Parkir Pasar

- Retribusi Pelayanan Parkir Roda 4 (mobil) dengan tarif Rp. 1.000,-
- Retribusi Pelayanan Parkir sepeda motor dengan tarif Rp. 500,-
- Retribusi Pelayanan Parkir sepeda pancal dengan tarif Rp. 300,-

e. Pemakaian Ponten / Toilet / MCK Pasar

- Mandi dengan tarif Rp. 1.000,-
- Buang Air Besar / Kecil dengan tarif Rp. 500,-
- f. Retribusi Pendapatan Asli Daerah dari Pasar Baru pendapatannya per bulan tidak menentu
- g. Alur pelayanan petugas pemungut retribusi kepada pedagang diberi karcis sesuai nominal dan luasnya tempat yang dilakukan setiap hari (Senin s/d Minggu) kecuali Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha serta gangguan tak terduga.
- h. Secara administratif hasil penarikan / pemungutan retribusi, petugas membuat SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) diketahui Kepala UPT Pasar Baru kemudian diproses pengecekan dan dicocokkan jumlah setorannya oleh bagian Pelayanan Administrasi Bidang Pendapatan dibuatkan STS (Surat Tanda Setoran) diketahui Kepala Bidang Kasda pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo dan langsung disetor ke Bank Jatim.

Namun demikian disisi lain terdapat banyak kelemahan yang memerlukan tindakan mendesak oleh pemerintah daerah mengingat kondisi pasar yang sudah bisa dikatakan tidak layak dan tidak nyaman lagi sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tersebut sehingga daya saing pasar menurun yang pada gilirannya pendapatan para pedagang juga sangat berkurang.

Pemerintah Daerah sebenarnya telah berupaya memperbaiki penampilan pasar tradisional dengan merenovasi bangunan pasar untuk menarik kembali minat pembeli untuk berbelanja dipasar tradisional. Pelaksanaan Kegiatan Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Baru Kota Probolinggo tersebut dilaksanakan Tahun 2012 dengan jumlah anggaran Rp. 434.220.000 yang diambil dari APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2012 melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Badan

Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Probolinggo. (*sumber BAPPEDA Kota Probolinggo*).

Revitalisasi dan penataan ulang pasar tradisional merupakan upaya Pemerintah Kota Probolinggo guna meningkatkan peran pasar tradisional serta mengembalikan fungsi pasar tradisional sebagai sarana dasar kegiatan perekonomian kota. Peningkatan dan penataan pasar tradisional yang ada dirasa sangat penting, karena peran pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat sangat besar (terutama dalam hal ini untuk masyarakat menengah kebawah). Selanjutnya dengan upaya penataan pasar baru diharapkan akan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Kota Probolinggo.

Pembangunan pasar tradisional (dalam hal ini berupa penataan Pasar Baru Kota Probolinggo) yang representatif, dibutuhkan juga untuk mengangkat citra dan budaya masyarakat Kota Probolinggo melalui *style* dan bentuk bangunan yang mencirikan budaya setempat.

Dengan penataan Pasar Baru tersebut diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan tingkat pelayanan pasar ini terkait dengan aspek-aspek pembangunan baik aspek fisik maupun non fisik. Untuk aspek fisik misalnya terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta kemudahan akses dalam maupun luar pasar. Sedangkan untuk aspek non fisik misalnya terkait dengan kenyamanan dan keamanan pengunjung baik pedagang maupun pembeli dalam memanfaatkan Pasar Baru.

Beberapa pasar tradisional yang telah direnovasi fisik antara lain Pasar Gotong Royong, Pasar Baru, Pasar Mangunharjo, Pasar Ketapang dan Pasar Wonoasih. Namun, upaya ini ternyata berujung pada permasalahan yang sama yaitu tetap seperti kondisi sebelumnya kumuh / kurang sehat, semrawut, dan zonasi jenis dagangan belum tertata dengan baik. Ada pula pedagang yang memilih berjualan di luar kompleks pasar karena di dalam tidak laku, terutama di pasar yang bangunannya lebih dari satu lantai sehingga timbul masalah baru yaitu terjadinya kemacetan.

Di antara pasar tradisional yang ada di Kota Probolinggo, Pasar Baru Kota Probolinggo termasuk salah satu pasar tradisional yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk menjamin kenyamanan para pedagang dan konsumen dalam bertransaksi di dalam pasar tersebut. Langkah ini sudah sangat mendesak mengingat kondisi fisik dan tata letak serta fasilitas yang ada di Pasar Baru sudah tidak bisa menjamin kesejahteraan para pedagang dan masyarakat konsumen yang berbelanja di pasar Baru kota Probolinggo.

Situasi dan kondisi pasar tradisional, khususnya pasar Baru kota Probolinggo dapat dikatakan tidak nyaman lagi untuk pedagang maupun para konsumen. Banyak bagian dan sudut pasar yang tidak representatif. Fisik bangunan pasar kurang kokoh dan sudah rusak, diperparah dengan kurangnya tempat sampah, saluran limbah yang telah tertutup, kurangnya pencahayaan dan banyaknya pedagang yang berjualan di lorong.

Keberadaan pedagang yang berjualan di lorong karena tidak mendapatkan bedak itu mengganggu kelancaran access distribusi dan lalulintas pengunjung/pembeli di dalam pasar sehingga menimbulkan berjubelnya pengunjung di berbagai ruas lorong. Keadaan seperti ini tentu mengurangi daya tarik pengunjung untuk berbelanja di pasar tradisional karena tentunya sangat berpengaruh pada bertambahnya waktu yang diperlukan untuk berbelanja karena terhambat lalu lintas dalam pasar.

Perparkiran yang mengambil tempat di jalan sekitar pasar juga telah mengakibatkan kemacetan kendaraan, baik kendaraan yang melintas maupun kendaraan milik pedagang dan pebelanja yang menuju / meninggalkan pasar.

Selain kondisi tersebut, fasilitas umum bagi pedagang dan konsumen juga kurang memadai misalnya kamar mandi dan toilet yang masih menjadi satu antara laki-laki dan perempuan, serta tempat ibadah yang tidak terawat. Kondisi tersebut juga telah mengakibatkan kondisi lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena terdapat banyak lalat.

Fakta kondisi pasar Baru Kota Probolinggo sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak khususnya stakeholder pasar. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memberdayakan pasar Baru sebagai pasar tradisional yang kompetitif, namun hasilnya hingga saat ini masih belum mampu mengatasi permasalahan yang ada secara nyata.

Terkait dengan fakta kondisi pasar Baru tersebut jika ditinjau dari sisi teoritis bahwa pembuatan kebijakan oleh pemerintah kota Probolinggo

masih belum sepenuhnya mengacu pada prinsip public policy. Prinsip-prinsip public policy tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ryant D. Nugroho (Dalam Mujianto:2004) bahwa dalam tataran pelaksanaan ketatanegaraan dan pemerintahan, kebijakan publik dibagi dalam 3 (tiga) prinsip yaitu:

- Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan);
- Cara kebijakan publik diimplementasikan; dan
- Cara kebijakan publik dievaluasi.

Lebih dari itu secara manajerial pemerintah Kota Probolinggo terkesan masih setengah hati dalam mengadopsi model New Public Manajemen dalam pengelolaan pasar tradisional yang ada.

Berdasarkan fenomena dan data hasil observasi awal sebagaimana diuraikan di atas, maka penting dilakukannya penelitian agar dapat mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kota Probolinggo dalam pengelolaan pasar tradisional di kota Probolinggo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam Pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Probolinggo ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo ?
3. Bagaimana alternatif kebijakan sebagai solusi pengelolaan pasar tradisional kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan antara lain :

1. Mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam Pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Probolinggo.
2. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Memberikan alternatif kebijakan sebagai solusi pengelolaan pasar tradisional kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Akademis

1. Menghasilkan nilai yang berguna bagi pengembangan bidang ilmu Administrasi publik dan secara khusus diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan sub bidang kebijakan publik.
2. Dapat memberikan kontribusi khasanah ilmu pengetahuan, sumber informasi/referensi bagi pembaca, serta bagi siapa saja yang hendak memperdalam penelitian yang berhubungan dengan pasar tradisional.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi referensi dan kontribusi yang berguna bagi pemerintah atau institusi publik dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pasar tradisional.

2. Dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dan instansi terkait untuk mengadakan koordinasi yang harmonis sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan. Khususnya untuk kebijakan publik sebagai bentuk perhatian kepada pasar baru baik pedagang maupun pembeli guna meningkatkan minat dan daya saing pasar baru.

c. Manfaat Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan tambahan kajian teori pada perkembangan ilmu pengetahuan di ranah Ilmu Administrasi Publik khususnya pada teori kebijakan publik dan penerapan paradigma New Publik Manajemen dan dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai acuan dalam penelitian yang dapat dikembangkan kembali.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Marcel Seran. 2014) bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad 20. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat.

Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pemerintah bertindak sebagai regulator. Untuk itu Pemerintah Kota Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Salah satu tujuan dari diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b:

“memberdayakan Pengusaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya”.

Sedangkan kewajiban umum Pemerintah dengan berbagai unsur birokrasi yang dimiliki ditetapkan dalam Bab IV pada Peraturan Daerah tersebut, yang antara lain berkewajiban memberikan perlindungan kepada keberadaan pasar tradisional sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (4) :

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c. dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah melakukan;
 - d. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi sertapelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. pemberian subsidi dan pinjaman lunak kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - f. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - g. pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - h. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - i. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (3) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (4) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

2.2. Definisi Pasar

Istilah pasar telah ada sejak dahulu kala sebelum Indonesia merdeka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pasar diartikan sebagai tempat orang berjual beli. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual

lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (D. Susilo 2011:29). Definisi pasar menurut H. Nystrom adalah suatu kegiatan di mana untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen.

Sedangkan definisi Pasar dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Menurut Undang-undang RI. Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai sebuah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

Sedangkan Pasar Tradisional, dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 menyebutkan bahwa Pusat Perbelanjaan adalah suatu arena tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang

didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

2.2.1. Sejarah Pasar Tradisional

Sejarah pasar tradisional mungkin berbeda dalam setiap negara, akan tetapi pada dasarnya sama, yaitu tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi di Indonesia, dalam sejarahnya pasar tradisional di Indonesia sudah ada pada jaman sebelum adanya Pemerintahan Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun kerajaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Titi Surti Nastiti, seorang ahli arkeologi dan epigrafi Pusat Arkeologi Nasional (National Geographic, 2013), didapatkan bahwa pasar tradisional telah ada sejak abad ke-8.

Dengan demikian, pasar tradisional memang sudah sangat mendarah daging pada masyarakat Indonesia, sejak zaman dahulu kala, dan ini seharusnya bisa menjadi sebuah daya tarik bagi suatu negara khususnya dalam bidang perekonomian dan pelestarian budaya bangsa. Secara hukum, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha

skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional dari tahun ke tahun memang menyisakan sejarah yang sangat menarik untuk digali lebih dalam, karena dengan menggali lebih dalam tentang pasar tradisional, kita bisa mengenal karakter budaya suatu bangsa dengan melihat kehidupan orang-orang didalam pasar tradisional. Pasar tradisional yang ada di Indonesia, setelah zaman kemerdekaan memiliki sejarah yang berliku-liku, mulai dari masa kejayaannya sebagai pusat perekonomian, hingga menjadi sebuah kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya. Namun demikian seiring perkembangan zaman, pasar tradisional kini mulai kehilangan pamornya sedikit demi sedikit dikarenakan persaingan yang begitu hebat dengan adanya pasar-pasar modern yang menjanjikan sebuah kenyamanan dan kepastian.

2.2.2. Eksistensi Pasar Tradisional

Eksistensi pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan indikator paling nyata kegiatan ekonomi kemasyarakatan di suatu daerah. Pemerintah harus lebih fokus dan peduli terhadap eksistensi pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik berbiaya murah yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat pedagang dan pembeli bertransaksi jual beli, melainkan juga mendukung kelancaran produksi, distribusi hasil pertanian, dan

industri kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan jaman, perubahan gaya hidup, dan kualitas sarana yang diusung oleh beberapa pihak komersil ritel modern begitu hebat sehingga membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit tenggelam.

Kondisi tersebut bertentangan, mengingat bahwa sektor pasar tradisional yang sebenarnya memiliki potensi dan kapasitas cukup besar ini, juga menghadapi kompetisi kualitas sarana dan produk dari perkembangan sektor ritel modern. Mengangkat eksistensi pasar tradisional merupakan action sangat penting, mengingat dalam kegiatan pasar modern, terjadi kegiatan jual beli antara masyarakat yang menginginkan kualitas dan ekonomis produk. Hal ini seharusnya diintensifkan dengan kecepatan dalam melakukan inovasi pemasaran guna menarik konsumen yang merupakan kunci sukses di sektor ritel, yang seharusnya juga diimplementasikan pada pasar tradisional agar nilai eksistensi itu tidak pudar.

Revitalisasi pasar tradisional dinilai sangat strategis untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah persaingan dengan ritel modern, dan pusat-pusat perbelanjaan yang kian memamabiak di berbagai wilayah perkotaan. Karenanya, pemerintah melakukan revitalisasi untuk membangkitkan dan menggerakan kembali eksistensinya, sekaligus memposisikan pasar tradisional dengan konsep belanja satu atap yang aman, nyaman, bersih dan ekonomis bagi pembeli maupun pedagangnya. Tentunya eksistensesi pasar tradisional ini tidak

mungkin bisa terjaga jika pemerintahnya sendiri tidak memberikan perhatian yang khusus terhadap keberlangsungan dari pasar tradisional ini, harus ada kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku pasar tradisional sehingga eksistensi dari pasar tradisional ini bisa terjaga dan tidak kalah saing dengan pasar modern. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang membudayakan pasar tradisional, ataupun himbaun terhadap masyarakat luas untuk kembali meramaikan pasar tradisional, lebih dari itu dengan adanya para investor asing yang membawa modal besar-besaran ke tanah air akan menjadi ancaman bagi para pengusaha kecil dan pasar tradisional, oleh karena itu pemerintah juga harus memikirkan bagaimana para pelaku pasar tradisional ini bisa tetap berjalan, salah satunya dengan pemberian pinjaman modal, namun yang lebih penting lagi adanya pelatihan skill kewirausahaan agar bisa bersaing dengan para pihak asing yang datang sehingga para pelaku pasar tradisional tidak hilang tergerus zaman ditengah maraknya pasar-pasar modern yang kian berkembang dimanamana.

2.2.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional

Pasar tradisional yang kini semakin ditinggalkan oleh masyarakat memang sudah sewajarnya jika memerlukan bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah dirasa sangat penting karena hanya pemerintah yang memiliki kewenangan secara formal untuk membantu. Upaya pemerintah

dalam menjaga eksistensi pasar tradisional sebenarnya sudah mulai nampak dengan adanya wacana-wacana tentang penertiban pasar-pasar tradisional agar bisa tertata rapi sehingga nyaman untuk masyarakat, namun wacana tersebut belum bisa berjalan maksimal, karena pada kenyataannya pasar-pasar tradisional yang ada sekarang keadaannya justru masih banyak yang tidak terurus, sehingga kesan pasar tradisional yang kumuh, bau, tidak terawat masih terngiang dalam benak masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih pergi ke pasar-pasar modern yang terkesan bersih, nyaman, wangi dan segar karena menggunakan AC di dalamnya.

Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional juga terlihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semangat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional telah dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta penjabaran teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor : 53/M-DAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut merupakan pengejawantahan dari semangat Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berkaitan dengan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diatur dalam Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007, pasal 2 ayat (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2, ayat (2), Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/ PER/12/2008, Kabupaten/Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan kepada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa pengaturan Zonasi antara Pasat Tradional dan Toko/Pasar Modern, Pengaturannya diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah atau dalam pengertian lain. Pemda dalam pembuatan rencana tata ruang harus memperhatikan mengenai zonasi pasar tradisional dan toko/pasar modern. Oleh Karena itu dapat dikatakan bahawa zonasi ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi pasar tradisional.

Pemerintah selain dengan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan diatas, dalam menjaga eksistensi pasar tradisonal, juga telah mengeluarkan peraturan yang paling baru yaitu Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Disebutkan dalam peraturan tersebut dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dengan mengacu pasal tersebut, pemerintah harus melindungi pasar tradisional, dengan segala upaya apapun tentunya dengan tidak melanggar undang-undang yang ada agar pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern. Namun yang terjadi kini walaupun ada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, tetap saja pasar tradisional dengan perlahan namun pasti telah terpinggirkan dengan adanya pasar modern yang semakin berkembang. Lalu sebenarnya apa yang salah dengan keadaan ini. Pemerintah membiarkan para investor asing masuk, dan pasar-pasar modern bermunculan seperti, supermarket, hypermarket dan sejenisnya terus berkembang, hal ini karena memang sangat menguntungkan pemerintah dan bisa menambah pendapatan pemerintah dari pajak yang dihasilkan, namun disisi lain hal ini akan mematikan pasar tradisional. Selain itu kesadaran dari masyarakat sendiri yang kurang terhadap dampak adanya pasar modern, masyarakat tidak berfikir jauh tentang akibat kegemaran mereka yang lebih memilih pasar modern untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka. Masyarakat tidak berfikir bahwa dengan memilih pasar modern akan mematikan pasar tradisional.

Sebenarnya masyarakat mungkin sebagian tahu akan hal demikian, namun mereka tidak mau tahu dan lebih mementingkan gengsi mereka dari pada kehidupan rakyat kecil yang notabene orang-orang sebangsa mereka. Disamping itu, pasar tradisional juga tidak mampu membenahi keadaan yang ada didalam pasar tradisional walaupun sudah ada upaya pemerintah dalam menertibkan pasar tradisional sehingga bisa lebih nyaman untuk didatangi oleh masyarakat atau konsumen.

Persoalan-persoalan yang terjadi sebetulnya sudah bisa diidentifikasi walaupun tidak secara penuh, namun seharusnya pemerintah bisa berkaca dan melihat persoalan-persoalan tersebut untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menanggulangi persoalan-persoalan tentang pasar tradisional dan menjamurnya pasar modern. Akan tetapi pemerintah belum bisa dan terkesan membiarkan itu semua dan menjadikannya wahana politik untuk merebut suara rakyat dengan menjanjikan program-program yang mementingkan rakyat kecil dengan mendahulukan pasar tradisional dari pada pasar modern.

2.2.4. Sejarah Masuknya Pasar Modern ke Indonesia.

Masuknya pasar modern di Indonesia ditandai dengan adanya supermarket-supermaket, toko swalayan, dan waralaba yang notabene berasal dari investor asing yang memiliki modal besar dan berani bersaing. Masuknya Supermarket atau pasar modern telah ada sejak tahun 1970-an, akan tetapi masih dalam ruang lingkup kota-kota besar dan tujuan pasar mereka juga masih terbatas pada masyarakat menengah keatas. Baru

setelah awal tahun 1990-an supermarket mulai menjamah daerah-daerah kecil di Indonesia.

Pengertian pasar modern dalam peraturan di Indonesia yang berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan RI No 53/M-DAG/PER/12/2008, disebutkan bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departmen Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka keberadaannya secara hukum, pasar modern telah diakui oleh pemerintah, karena memang dengan adanya pasar modern ini sangat menguntungkan bagi pemerintah yaitu melalui pajak yang dihasilkan, dan banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia. Akan tetapi disisi lain, dengan hadirnya para investor asing ini, dengan melahirkan pasar modern secara tidak langsung akan mematikan para pengusaha kecil, terlebih lagi pasar tradisional. Pasar tradisional mengalami dampak yang signifikan dengan adanya pasar modern ini. Dengan adanya pasar modern, peminat pasar tradisional semakin menurun. Sebenarnya, dengan adanya pasar tradisional ini mengakibatkan kaum-kaum borjuis yang lebih individualis, hal ini bisa dilihat dari cara konsumen membeli barang-barang yang ada pada pasar modern, para konsumen datang, lalu mengambil barang dan membayarnya pada kasir setelah itu pergi tanpa ada interaksi diantara penjual dan pembeli. Interaksi ini berbeda dengan yang terjadi pada pasar tradisional

yang didalamnya terjadi banyak interaksi sosial masyarakat sehingga kita bisa melihat kehidupan suatu bangsa didalam pasar tradisional karena banyak hal yang terjadi didalam pasar tradisional.

2.3. Regulasi Pemerintah Pusat tentang Pasar

Pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator telah melaksanakan kebijakannya dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2.4. Regulasi Pemerintah Daerah tentang Pasar

Dalam melaksanakan perannya sebagai regulator sekaligus pengelola, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Dengan diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang pasar tersebut maka secara tidak langsung telah memerintahkan kepada pemegang kendali birokrasi untuk melaksanakan tugas dan perannya terkait pengelolaan pasar. Dalam Peraturan Daerah tersebut tercantum tentang kebijakan pemberdayaan pasar. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern (Perda Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern pasal 1 ayat 27).

Salah satu peran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo salah satunya terkait dengan redesain tata letak bangunan dan fasilitas serta sarana dagang di Pasar Baru Kota Probolinggo, yang sebenarnya telah diamanatkan dalam Perda Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern pasal 7 ayat 2 huruf c s/d huruf f sebagai berikut :

- c. dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah melakukan:
- d. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;

- e. pemberian subsidi dan pinjaman lunak kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
- f. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;.

Khusus terkait dengan huruf f di atas, maka sudah saatnya Pasar Baru Kota Probolinggo harus dilakukan redesain bangunan fisik dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Daerah.

2.5. Pengelola Pasar

Sebuah negara dibentuk dengan sengaja, secara bersama-sama memiliki tujuan agar pihak-pihak yang sepakat membentuk negara itu memperoleh kesejahteraan bersama yang didapatkan dari pengelolaan sumberdaya yang ada, terutama sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi yang ditempati. Maka dari itu adanya suatu lembaga pemerintah dalam sebuah negara dibentuk agar dapat mengatur dan mengelola sumber daya sehingga berdampak pada kesejahteraan semua warga negara.

Begitu juga sebuah pasar yang merupakan sebuah lembaga, sebagaimana dalam Undang-undang RI. Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni lembaga ekonomi, maka sebuah pasar tentu memiliki pengelola atau instansi yang secara khusus mengurus jalannya kegiatan di lingkup pasar tersebut. Tujuan akhirnya adalah agar para pengguna baik pedagang dan konsumen mendapat kesejahteraan dari keberadaan pasar dimaksud.

Di beberapa daerah kabupaten/kota pengelola pasar telah dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis khusus pasar. Bahkan Pemerintah Kota Balikpapan dan Kota Padang masing-masing sudah memiliki sebuah Dinas yang membidangi pasar yakni Dinas Pasar yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang tentunya langsung bertanggung jawab kepada Kepala Daerah / Walikota.

Dengan adanya sebuah instansi khusus yang mengelola pasar tentunya menunjukkan pentingnya peranan pasar bagi masyarakat di suatu daerah dan cermin kepedulian atau perhatian kepala daerah terhadap keberadaan dan pengelolaan pasar yang ada di daerahnya.

Sebagai suatu instansi pengelola pasar, UPTD ataupun Dinas Pasar tentu memiliki tatanan organisasi yang sistematis sesuai ketentuan legal formal yang ditetapkan oleh instansi pembentuknya atau atasannya. Maka dari itu karena telah memiliki organisasi yang telah ditetapkan secara legal formal maka dalam pelaksanaan tugas pokoknya tentu harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut. Dengan demikian baik dan tidaknya pengelolaan sebuah pasar tergantung dari kepemimpinan unit atau instansi pengelolanya. Disini tentunya memerlukan peran pemimpin satuan kerja tersebut secara efektif dan memerlukan pemimpin yang bisa bekerja dengan penuh visi cemerlang.

Sebagaimana Golemand, dkk (2006:68) mengemukakan bahwa pemimpin visioner akan membantu orang-orangnya untuk melihat posisi tugasnya di dalam gambaran besar visi bersama, dan bukan hanya

memberikan sense yang jelas bahwa apa yang mereka lakukan sungguh berharga tetapi juga mengapa mereka melakukannya.

Maka dengan demikian peran pimpinan unit pengelola pasar, dalam hal ini pengelola Pasar Baru Kota Probolinggo dalam mengelola unitnya memerlukan sikap yang visioner. Sikap spesifik itu jika diinteraksikan / dikomunikasikan dengan semua stakeholder maka akan dapat mempengaruhi seluruh organisasi yang dipimpinnya dan menjadi sebuah pendorong bagi semua bawahannya termasuk para pedagang yang ada di Pasar Baru. Hal ini telah dipesankan oleh Whetten & Cameron (2005:311) bahwa “*Managers must also recognize that their daily interaction with subordinates constitute an important source of motivation*” (Para manajer (pemimpin) harus juga mengetahui bahwa interaksi mereka tiap hari dengan bawahan merupakan sebuah sumber motivasi penting).

Pengelolaan pasar tradisional di Kota Probolinggo dilakukan oleh UPT Pasar Lingkup kerja UPT Pasar meliputi pengelolaan Pasar Baru, Pasar Kronong dan Pasar Randupangger. UPT Pasar ini secara struktural berada di bawah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo.

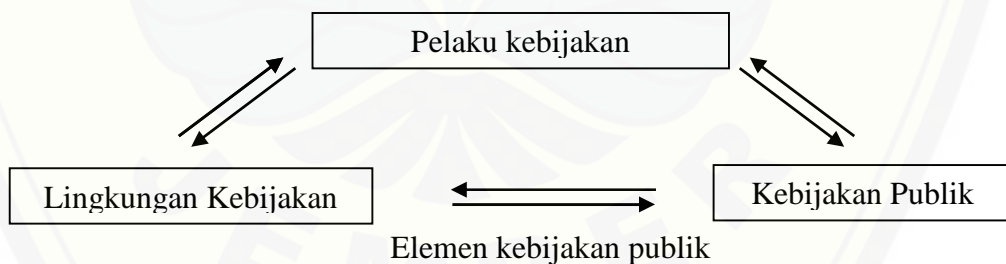
2.6. Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Proses yang berlangsung dalam Hogwood dan Gunn (dalam Suharto) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan Bridgman dan

Davis (dalam Suharto) menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
- Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah
- Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
- Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.
- Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y.
- periode waktu tertentu yang relatif panjang.

Sistem kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam Wahyono, 2015), sedikitnya terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen pertama: kebijakan publik (*public policies*), komponen kedua: stakeholders kebijakan (*policy stakeholders*), dan komponen ketiga: lingkungan kebijakan (*policy environment*).



Kebijakan publik (*public policies*) yang merupakan isi kebijakan itu sendiri (*policy content*) terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang

kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan.

Sebagai pelayan publik, posisi pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan pasar tradisional. Karena pasar merupakan kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian agar dalam pengelolaan pasar dapat berjalan dengan sistematis maka perlu dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang komprehensif. Dalam perumusan kebijakan pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya:

Pertama, Perubahan paradigma pengelolaan pasar, di mana revitalisasi pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan di pasar tradisional, mulai dari pemilahan komoditas; pengangkutan; bongkar muat; pengemasan; hingga penjualan komoditas di pasar.

Kedua, Menegakkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar secara konsisten, misalnya yang menyangkut tata ruang, alihguna lahan, perizinan bagi pasar modern, ketentuan batas minimal jarak pasar modern dari pasar tradisional, pembatasan pembangunan pasar modern

di lingkungan permukiman penduduk, pengaturan tentang bongkar musat barang, dan jaminan kontrol kualitas (*quality control*) komoditas.

Ketiga, Merumuskan model kemitraan lintas stakeholders untuk memberdayakan para pedagang di pasar tradisional serta memperkuat posisi tawar pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern, misalnya dengan: Merumuskan kebijakan kemitraan atau *corporate social responsibility* dari pasar modern terhadap pasar tradisional sebagai bentuk subsidi silang; menerapkan ketentuan bahwa pengelola/pengembang harus memberikan kemudahan dalam kredit pemilikan kios bagi pedagang lama;

Menurut Rahmad Hidayat (2015) kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik).

Tujuan kebijakan publik menurut Rahmat Hidayat (2015) adalah Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :

- Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- Melindungi hak-hak masyarakat
- Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Sementara Kasim mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara.

Pengelola Pasar dapat bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kredit kepemilikan kios dengan bunga lunak bagi pedagang lama; Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dapat melakukan pembinaan terhadap para pedagang pasar tradisional atau melalui kelompok pedagang tertentu yang ada di pasar setempat secara kontinyu agar nantinya dapat memenuhi syarat untuk menjadi mitra bagi pihak pengelola pasar.

Modernisasi pasar untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil, dengan menerapkan manajemen pasar secara rasional, berorientasi pada standarisasi kualitas komoditas, standarisasi harga penjualan (*fixed price*), standarisasi fisik bangunan, dan lain sebagainya. Mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan pasar tradisional, misalnya dengan membangun pasar-pasar tematik bagi pengembangan pasar modern, seperti pasar yang khusus berjualan tekstil, elektronik, bahan bangunan; pengembangan pasar secara tersebar, tidak bersifat linier mengikuti arus jalan, yang diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah kota sekaligus meminimalkan penumpukan kegiatan ekonomi di satu wilayah yang dapat memicu terjadinya kesenjangan, kemacetan, dan melemahnya kapasitas lingkungan.

Kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada penerbitan sebuah Peraturan Daerah tetapi perlu disusun secara detail dan sistematis hingga tataran implementasi kebijakan dimaksud secara jelas dan transparan.

2.7. New Public Management dalam Pengelolaan Pasar Tradisinoal

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management. NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004 : 25), yaitu:

- a. Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
- b. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
- c. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan “social learning”

dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM ini adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan (*steering*) dari pada menjalankan sendiri (*rowing*), harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan memekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input (Rosenbloom & Kravchuck, 2005).

M. Minougue (2000) paling tidak menyebut adanya 5 karakteristik utama Public Management, yaitu:

2.7.1. *A separation of strategic policy from operational management.* Public management lebih banyak terkait dengan tugas-tugas operasional pemerintahan dari pada peran perumusan kebijakan.

2.7.2. *A concern with results rather than process and procedure.* Public management lebih berkonsentrasi pada upaya mencapai tujuan daripada upaya berkuat dengan proses dan prosedur.

2.7.3. *An orientation the needs of customer rather than those of bureaucratic organizations.* Public management lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dari pada kebutuhan birokrasi.

2.7.4. *A withdrawal from direct service provision in favour of a steering or enabling role.* Public management menghindarkan diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran utamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada masyarakat.

2.7.5. *A transformed bureaucratic culture/ A change to entrepreneurial management culture.* Public management mengubah diri dari budaya birokrasi.

Prinsip New Public Management (by Hood, 1991)

- a) Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan.
- b) Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya.
- c) Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan pada prosedur.
- d) Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar didalam sektor pelayanan publik.
- e) Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
- f) Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik.
- g) Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.

2.8. Pemerintah Daerah

Keberadaan pemerintahan pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah pelayanan umum. Menurut Lonsdale (Endang Wirjatmi TL, 1996:9) *“Pelayanan umum adalah sesuatu yang disediakan baik oleh organisasi pemerintah atau swasta, karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan sosial”*.

Sejalan dengan definisi tersebut, birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, dalam pemerintahan modern pada era globalisasi dewasa ini, pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (*the closer the government, the better it services*) (Osborne, D. dan Gaebler, T., 1992).

Adanya fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan yang diemban oleh birokrasi, jelas tidak dapat dipisahkan dari filsafat kerakyatan sebagai inti ajaran kontrak sosial yang dikembangkan oleh Rousseau J.J. (Poerbopranoto, K, 1987;17). Untuk merealisasikan fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan

sebagaimana tersebut, maka birokrasi pemerintahan harus menjalankan kebijakan-kebijakan negara, dan untuk itu pemerintah harus dilengkapi dengan berbagai instrumen maupun sarana yang diharapkan mampu memacu kinerjanya secara optimal. Meskipun demikian, dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat diamati bahwa pemerintah menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan fungsi pelayanan dan kesejahteraan menjadi tersendat.

Profesionalisme birokrasi yang dituntut oleh good governance tidak terbentuk dengan sendirinya. Haruslah ada upaya sadar untuk mewujudkannya yang seringkali menempuh proses yang panjang. Beberapa strategi dapat disebutkan disini (Tjokrowinoto, 2001: 18) :

1. Role Modelling. Sebagaimana disebutkan, standar perilaku dan pola perilaku birokrat terbentuk antara lain melalui keteladanan. Oleh karena itu sikap elite akan amat menentukan sosok profesionalisme birokrasi.
2. Rekrutmen, kondisi kerja dan pelatihan. Proses rekrutmen yang obyektif, kondisi kerja yang kondusif, dan pelatihan yang menggunakan methodik dan dedaktik yang tepat merupakan wacana pembentukan profesionalisme yang efektif.
3. Pendekatan proses belajar. Learning process approach sebagaimana dikemukakan David Korten merupakan wacana yang efektif bagi pembentukan profesionalisme ini. Pendekatan ini memberi margin toleransi yang besar bagi birokrasi untuk berbuat kesalahan (*embracing error*) dalam proses pembentukan dan penyempurnaan profesionalisme

karena kesalahan akan menjadi input untuk perbaikan diri. Melalui kesalahan tadi, birokrat akan belajar efektif (*learning to be effective*), dan dari sana akan melangkah menuju belajar efisien (*learning to be efficient*), dan pada akhirnya belajar berkembang (*learning to be expand*).

4. Pembentukan profesionalisme bagi pengembangan sumber daya birokrasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan penguatan organisasi (*organizational strengthening*) yang memfokuskan diri pada sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja pada struktur mikro dan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) yang memfokuskan diri pada struktur makro kelembagaan.
5. Last but no least, pembentukan profesionalisme memerlukan kontrol sosial dari masyarakat sipil. Meskipun nampaknya merupakan kontradiksi, di satu sisi profesionalisme birokrasi menuntut kemampuan *empowering* masyarakat sipil melalui pembentukan *enabling social setting*, namun disisi lain, masyarakat sipil perlu melakukan kontrol sosial terhadap birokrasi. Hal ini menuntut *mutual learning process* antara birokrat dan masyarakat sipil.

Dalam era globalisasi, perubahan ekonomi dunia, dan persaingan yang semakin tinggi ini, dimana perkembangan teknologi yang begitu cepat, mengakibatkan peran tenaga kerja kasar (*blue color labour*) semakin berkurang. Dengan demikian melimpahnya tenaga kerja yang tidak disertai dengan kualitas yang tinggi bukan lagi merupakan suatu keunggulan

komparatif (*comparative advantage*), melainkan hanya merupakan suatu beban negara yang berat harus diatasi, bukan hanya dengan penyediaan kesempatan kerja saja melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sehingga mampu bersaing dan menjadi suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

2.9. Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Sebagaimana hakikat keberadaan pemerintahan adalah memberikan pelayanan umum (*public service*) kepada masyarakat, maka dalam konteks pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Probolinggo tentunya harus memenuhi kepuasan masyarakat. Dalam Undang-Undang R.I Nomor 25 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik terdapat definisi bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan pada pasal 1 ayat 4 yang dimaksud penyelenggara adalah

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Lebih jelas lagi dalam konteks pengelolaan pasar ini bahwa dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tersebut pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa penyediaan jasa publik merupakan ruang lingkup pelayanan publik dan dalam Penjelasan pasal 5 ayat (4) huruf a secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu contoh dalam penyediaan jasa publik adalah pelayanan pasar.

Dengan demikian, jelas bahwa Pemerintah Daerah Kota Probolinggo harus menjalankan perannya sebagai penyedia pelayanan publik dalam hal ini pengelola pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Probolinggo sebagai prasarana perekonomian warga masyarakat Kota Probolinggo sebagai wujud public service berdasarkan Undang-undang.

Lebih lanjut Manoarfa (2012) menyebutkan bahwa pelayanan publik harus memenuhi Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05, No 01, 2012. Monoarfa). Rudiyanto (2005) menyebutkan bahwa “Inti dari pelayanan publik adalah sikap menolong, bersahabat dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat

dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut”.

Maka dari itu kebijakan pemerintah Kota Probolinggo harus mampu memberikan pelayanan publik yakni penyediaan pasar sebagai produk layanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

2.10 Pasar Baru Kota Probolinggo

Sebagai pasar tradisional yang telah menjadi prasarana perekonomian masyarakat Kota Probolinggo, memiliki peranan yang amat penting dan mencakup hajat hidup masyarakat baik pedagang maupun pelanggan pasar juga pihak lain seperti penyedia sarana transportasi, perparkiran, perbankan dan penyedia jasa lain yang terkait dengan keberadaan pasar Baru Kota Probolinggo. Pengelolaan Pasar Baru agar menjadi sebuah tempat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat yang nyaman dan produktif dan mampu menyejahterakan semua pihak yang membutuhkan maka perlu peran serta pengelolaan dari pemerintah daerah Kota Probolinggo. Fungsi Pemerintah daerah amat vital karena yang berwenang mengatur dan menata serta membuat kebijakan terkait dengan pasar hanyalah Pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Probolinggo.

Jikalau pun penataan dan pengelolaan sebuah pasar tradisional dilakukan oleh pihak swasta, namun tentu tidak sepenuhnya pihak swasta bebas tanpa batasan regulasi pemerintah. Maka dari itu terkait dengan pasar Baru Kota Probolinggo sangat membutuhkan peran yang dominan dari

pemerintah daerah karena pasar Baru merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Oleh karena itu bahwa pasar Baru merupakan prasarana umum yang dibiayai dari APBD sehingga pengelolaannya harus mampu mensejahterakan banyak pihak, atau dengan kata lain harus menjamin kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan pengelola dan bukan hanya menyejahterakan para pedagang saja. Sejahtera yang dimaksud disini artinya adalah nyaman, aman, saling menguntungkan kepada semua pihak yang terkait dengan keberadaan pasar.

2.11 Penelitian Terdahulu

2.11.1. Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Depok

Pengelolaan pasar tradisional pada umumnya masih belum bisa meningkatkan motivasi belanja masyarakat menuju ke pasar tradisional. Hal ini disinyalir pemerintah daerah belum optimal memberdayakan pasar tradisional dan bahkan dapat dikatakan “buntu” dalam gagasan tentang harus berbuat apa dan harus diapakan pasar tradisional yang ada di berbagai semua daerah tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami & Riduansyah tentang pengelolaan pasar tradisional di Kota Depok disimpulkan bahwa kondisi pasar tradisional di Kota Depok cukup memprihatinkan. Banyak kios dan los yang tutup di pasar Agung terutama pada lantai dua dikarenakan letaknya kurang strategis, sehingga banyak ditinggalkan pedagang. Sedangkan pada Pasar Cisalak dan pasar Kemiri Muka, kios dan los banyak

yang tutup karena pedagang biasanya keluar untuk menjadi PKL dikarenakan lokasi yang lebih mudah dijangkau pembeli (Utami & Riduansyah:2013).

Pengelolaan pasar tradisional di Kota Depok menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok.

2.11.2. Studi Kasus Pasar Tradisional Beringharjo Jogjakarta

Dari studi kasus yang dilakukan di pasar Beringharjo Kota Jogjakarta ini terkait dengan upaya revitalisasi pasar tradisional Beringharjo.

Febriyanti (2013) yang mendokumentasikan hasil studi kasusnya dengan judul *Model of Role Strengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia: Study Case Beringharjo Market, Jogjakarta*, memaparkan bahwa :

“The policy related to the traditional market in national level is released by 9 (nine) related ministries. It shows the government’s big attention on development of the traditional market. The revitalization program which has been done more in physic aspect such as physic building and location managing, also setting the regulation related to traditional market. In facts, there are many found that markets have been renovated and have a far better new buildings, but they are not used well”.

Ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap fisik bangunan dan penataan lokasi tidak berdampak signifikan terhadap keberdayaan pasar tradisional, bahkan justru malah tidak dimanfaatkan oleh pedagang.

2.11.3. Studi Kasus Pasar Wonokromo Surabaya

Selain di kedua Kota tersebut di atas, pada studi kasus yang dilakukan oleh Prastiyawan, dkk. (2015) atas revitalisasi pasar Wonokromo Surabaya, disimpulkan bahwa secara umum revitalisasi pasar tradisional harus mencakup pada kondisi fisik gedung dan manajemen pasar tersebut.

Prastyawan, dkk. mengungkapkan bahwa revitalisasi pasar Wonokromo sebagai pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan PD Pasar Surya tidak memenuhi keinginan para pedagang di pasar tersebut. Peran pedagang pasar sebagai stakeholder hanya digunakan sebatas memenuhi regulasi (formalitas, pen.) pemerintah daerah semata.

“Traditional market revitalization undertaken by the city government of Surabaya and PD Pasar Surya impressed not favor the interests of traders. As an indication of the involvement of merchants as part of stakeholders is false or simply just meet the rules of good local governance”.

Lebih lanjut dalam kesimpulannya, Prastyawan, dkk. mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi pada kebijakan revitalisasi pasar tradisional adalah keterlibatan para pedagang sebagai stakeholder yang hanya sebatas obyek pelengkap semata.

“Problems traditional market revitalization actually covers the main issues, namely the lack of involvement of merchants as a stakeholder in the planning, implementation and supervision. Although there are some local laws that suggest the involvement of traders but in reality their involvement only as a complement to mere objects”.

Kebijakan merevitalisasi pasar tradisional semestinya dapat memenuhi harapan para pedagang yang ada di pasar tersebut yakni mengembalikan fungsi sebenarnya atas sebuah pasar dari kondisi yang kurang layak, kumuh, kotor dan rentan kriminal menjadi kondisi pasar sebagai tempat transaksi jual beli yang layak dan nyaman dan mampu menjadi prasarana perekonomian yang menyejahterakan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini Prastyawan, dkk. mengungkapkan :

“The desired change is to restore the normal function of the actual market as a buying and selling, because at that moment some of the traditional markets in the city of Surabaya in slum conditions, muddy, dirty, prone to criminality and some corners were occupied several homeless. PD Pasar Surya Surabaya look forward to the new market conditions after the revitalization of the buyer will feel comfortable in shopping, can improve the welfare and regularity traders as well as the creation of administrative order, so it will be able to boost the acquisition of regional revenue. Revitalization can indeed be positive, both for the old merchants, new merchant (there will be new employment opportunities) as well as for local municipalities. Revitalization of the market is a response to the demands of the changing times that are part of the new policy directors of PD Pasar Surya in the face of the rapid development of modern market in Surabaya, improving market conditions that are not feasible as well as meet the demands of consumers”.

Dengan adanya fenomena tentang pengelolaan pasar tradisional yang ada di berbagai daerah yang masih cenderung menunjukkan adanya berbagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu pelaksanaan pengelolaan yang belum memenuhi keinginan pedagang maupun yang dikelola tetapi justru merugikan para pedagang ataupun juga belum

melibatkan para pihak yang berkepentingan/stakeholder, maka pengelola pasar baru Kota Probolinggo dan pemerintah daerah setempat perlu mengambil pelajaran dalam mengelola pasar Baru. Untuk itulah masyarakat juga perlu memberikan sumbangsih dan kontribusi sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat utamanya yang membutuhkan keberadaan pasar tradisional.

2.12 Penelitian tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Negara lain

2.12.1. Pengelolaan Pasar Tradisional di Inggris

Kekhawatiran adanya ancaman terhadap eksistensi pasar tradisional tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di Inggris. Keberadaan pasar tradisional di negara yang konon sudah termasuk negara maju tersebut juga terancam oleh adanya pasar modern. Kekhawatiran tersebut pada akhirnya membuat parlemen Inggris mengeluarkan laporan pada tahun 2009 tentang hasil sebuah penelitian tentang pasar tradisional yang ada di Inggris. Laporan tersebut berjudul "*Can the traditional market survive?*" (Dapatkah pasar tradisional bertahan).

Sebagai awal dari laporan tersebut disebutkan bahwa telah diakui bahwa keberadaan pasar tradisional merupakan suatu sebab keberadaan berbagai kota. Selain menyatakan keberadaan pasar tradisional sebagai awal keberadaan berbagai kota, laporan tersebut juga menyatakan :

“there will be some markets in general that will be declining, and fewer markets in general that are improving”. (“secara umum akan ada beberapa pasar yang menurun dan secara umum lebih sedikit pasar yang berkembang”).

Namun demikian di bagian lain laporan tersebut juga menyatakan *“.....there is scope for optimism for the future provided that local authorities and other key stakeholders are willing and able to rise to the challenges that markets will continue to face”*. (terdapat optimisme masa depan pasar yang dapat diberikan oleh pihak yang berwenang dan stakeholder lainnya sebagai tantangan agar pasar dapat berlanjut, pen-).

Salah satu jenis pasar yang mampu mencapai kesuksesan dalam jurnal laporan penelitian dari parlemen Inggris dicontohkan adanya pasar khusus yaitu pasar pertanian. Pasar khusus tersebut dengan kriteria berikut ini:

Farmers’ markets are defined by the National Farmers’ Retail and Markets Association (FARMA) by the following criteria:

- a) stallholders should only sell what they produce/make
- b) stallholders should be drawn from the locality (typically 30 miles)
- c) the principal stallholder should be involved in production
- d) there is information at each stall and within the market about the produce sold. (Phyllis Starkey, 2009:7)

2.12.2. Pengelolaan Pasar Tradisional di Korea

Sebuah paper conference yang ditulis oleh Heung-Ryel, Kim (2015) dari MokWon University menyatakan bahwa dalam rangka mengubah strategi kebijakan terhadap keberadaan pasar tradisional di

Korea, pemerintah Korea memberikan dukungan strategis yaitu dengan meningkatkan proyek fasilitas termasuk perbaikan gang, tempat parkir, pelatihan dan pusat informasi serta proyek inovasi manajemen promosi, pemasaran, edukasi dan berbagai festival.

Berikut ini beberapa fakta yang terjadi atas pasar tradisional di Korea sebagaimana diungkapkan dalam paper conference yang ditulis oleh Kim (2015).

Keberadaan pasar tradisional di Korea antara tahun 2005 hingga tahun 2013 mengalami penurunan jumlah sebanyak 288 pasar, dimana pada tahun 2005 terdapat 1.660 pasar tradisional, namun pada tahun 2013 telah menurun sehingga jumlahnya tinggal 1.372 pasar tradisional. Menurut Kim, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pada lingkup bisnis distribusi pada tahun 1996.

With the change in distribution business environments, the consumption pattern has changed and moved towards large-scale discount and department stores, which enable one to enjoy a one-stop shopping culture in a friendly environment with a more convenient and comfortable shopping experience. Given the rapid rise of these one-stop stores, the number of traditional markets has declined from 1,660 in 2005 to 1,372 in 2013. (Kim, 2015:2).

Dalam bidang promosi pasar tradisinoal, pemerintah Korea pada tahun 2004 membuat program “*Special Act on the Nurturing of Traditional Markets*”. Program ini dimaksudkan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional yang ada di Korea. “.....*the government established the “Special Act on the Nurturing of Traditional Markets”*

in 2004. The act provided the tools for modernization and management innovation to a local traditional market”.

Disisi lain pemerintah Korea juga menerapkan konsep strategi pendekatan sumberdaya pariwisata.

The concept of culture and tourism-oriented local traditional markets has been a part of supporting projects by the Small and Medium Business Administration and the Small Enterprise Development Agency in the Korean government since 2008, which apply the strategies of using local historical or cultural characteristics and resources in local traditional markets, to enhance their attractiveness for tourists or visitors.

2.13. Definisi Konseptual

Guna memudahkan pemberian arah dan kejelasan tentang penelitian, maka perlu diberikan defenisi secara konseptual terhadap konsep penelitian sebagai berikut:

2.13.1. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan artinya selalu menggunakan akal budinya. Sedangkan kebijakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran.

James E. Anderson (dalam Islamy, 2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Ealau dan Prewitt dalam Muningsgar (2014) mendefinisikan kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh

perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang terkena kebijakan.

Sedangkan Titmuss dalam Muningsgar (2014) menjelaskan tentang kebijakan yaitu prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, senantiasa berorientasi kepada masalah dan tindakan.

Menurut Afiff (2015) memberikan definisi bahwa kebijakan adalah “cetak biru” dari kegiatan organisasional yang relatif berulang dan rutin. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kebijakan tidaklah sama dengan strategi. Karena menurutnya strategi berkaitan dengan keputusan-keputusan organisasional yang belum ditangani atau dihadapi sebelumnya.

Adapun formulasi kebijakan, menurut Afiff, adalah tanggung jawab manajemen tingkat atas. Sedangkan perumusan strategi pada dasarnya dilakukan oleh manajemen tingkat menengah keatas.

2.13.2. Pemerintah Daerah

Keberadaan pemerintahan pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah pelayanan umum. Menurut Lonsdale (Endang Wirjatmi TL, 1996:9) “Pelayanan umum adalah sesuatu yang disediakan baik oleh organisasi pemerintah atau swasta, karena umumnya masyarakat tidak

dapat memenuhi kebutuhan yang dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan sosial”.

Sejalan dengan definisi tersebut, birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, dalam pemerintahan modern pada era globalisasi dewasa ini, pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (*the closer the government, the better it services*) (Osborne, D. dan Gaebler, T., 1992).

Fungsi Pemerintah dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs)
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian).

Pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan

masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah. (Guritno dalam Pemerintah.net)

Fungsi sebagaimana diuraikan di atas hendaknya dijalankan oleh pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan Pasar Baru Kota

Probolinggo sebagai bentuk layanan publik kepada para pedagang, warga masyarakat konsumen dan semua pihak yang membutuhkan keberadaan pasar Baru sebagai prasarana perekonomian.

2.13.3. Pengelolaan

Istilah pengelolaan yang digunakan dalam penelitian ini artinya adalah proses kepengurusan suatu obyek. Obyek dalam hal ini adalah Pasar Baru Kota Probolinggo. Sehingga definisi dari pengelolaan yang dimaksudkan adalah pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo oleh semua birokrasi pemerintahan Kota Probolinggo yang terkait baik penganggaran, penataan, pengawasan, kebijakan politis dan pengamanan serta hal lain yang terkait dengan Pasar Baru Kota Probolinggo.

2.13.4. Pasar Tradisional

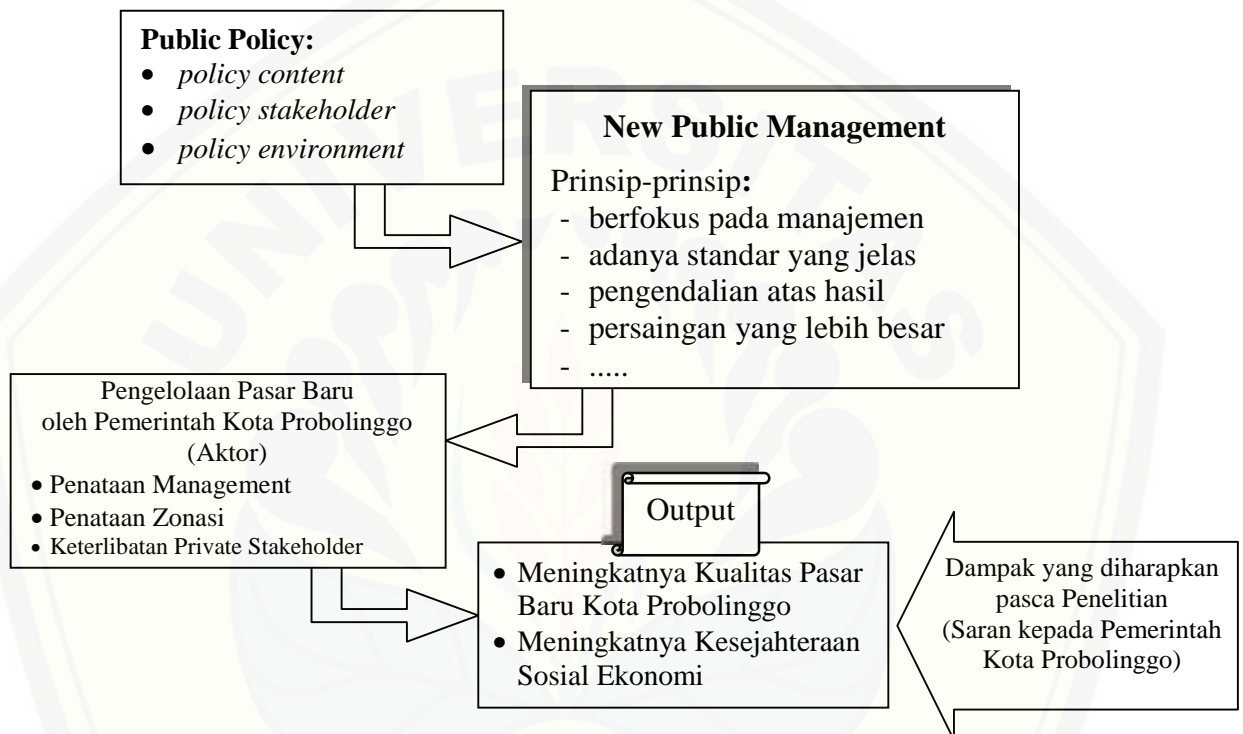
Yang dimaksud Pasar Tradisional dalam penelitian ini adalah Pasar Tradisional yang ada di wilayah Kota Probolinggo yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasar tradisional di wilayah Kota Probolinggo sebagiannya merupakan milik warga atau sekelompok warga di lingkungan setempat. Untuk pasar tradisional kategori ini maka pengelolaannya tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Probolinggo, namun menjadi tanggung jawab orang atau kelompok pemilik pasar tersebut. Namun demikian secara regulatif tentunya pasar yang dikelola oleh masyarakat secara

mandiri tersebut tetap harus mengikuti kebijakan regulasi yang berlaku di Pemerintah Kota Probolinggo.

2.14. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini juga dikenal dengan jenis riset etnografis, yaitu teknik riset dengan menyertakan observasi dan juga wawancara langsung dengan partisipan yang diteliti. Jenis riset ini dianggap sebagai metode riset yang holistik, karena ia dapat benar-benar memahami target pasar, peneliti akan memerlukan keterlibatan yang tinggi dalam lingkungan alamiah responden (Kotler & Lee, 2007:288).

Jenis penelitian ini sesuai dengan karakteristik stakeholder Pasar Baru Kota Probolinggo dimana sebagian dari mereka adalah para pedagang sehingga memerlukan pendekatan kultural.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini berpusat di Pasar Baru Kota Probolinggo yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

3.3 Alasan Pemilihan Tempat Penelitian

Di wilayah Kota Probolinggo terdapat beberapa pasar tradisional. Pasar-pasar tersebut antara lain adalah:

- 1) Pasar Baru
- 2) Pasar Mangunharjo
- 3) Pasar Ketapang
- 4) Pasar Randupangger
- 5) Pasar Kronong
- 6) Pasar Laweyan
- 7) Pasar Wonoasih

Dari ketujuh pasar tradisional tersebut pasar Baru merupakan pasar tradisional terbesar dan terletak di pusat kota yang sangat strategis. Selain itu pasar Baru Kota Probolinggo juga merupakan pasar tertua dibanding pasar lainnya. Lebih dari itu bahwa eksistensi pasar Baru tidak terlepas dari sejarah Probolinggo dimana pada jaman penjajahan Belanda, para pedagang yang berasal dari berbagai daerah memasuki daerah Probolinggo melalui sebuah sungai yang disebut kali Banger yang merupakan teluk dan tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang. Dengan demikian di pasar Baru itulah pusat perdagangan kala itu, yang dahulu disebut sebagai teluk Tambak Pasir. (Hakiem. 2013).

Pemilihan Pasar Baru dalam penelitian ini didasari atas pertimbangan antara lain:

1. Pasar Baru merupakan pasar tradisional terbesar diantara pasar tradisional yang ada di Kota Probolinggo.
2. Letaknya yang paling strategis di tengah kota dan di jalur jalan protokol.

3. Jumlah konsumen yang paling banyak karena didukung dengan adanya tempat-tempat tujuan belanja selain kebutuhan yang ada di pasar yaitu toko-toko yang ada di sekitar lokasi pasar Baru.
4. Menampung jumlah pedagang sebanyak 541 orang. Jumlah ini lebih banyak di banding dengan pasar lainnya.
5. Sudah adanya sumber daya pendukung antara lain:
 - a. Paguyuban Pedagang Pasar Baru
 - b. Bank Sampah
 - c. Radio Land Pro Pasar

Dengan jumlah pedagang yang banyak dan tempat yang strategis serta telah tersedianya potensi sumber daya pendukung yang baik, maka pasar Baru perlu peran Pemerintah Kota Probolinggo lebih banyak sehingga mewujudkan kondisi fisik lokasi pasar yang sehat dan mampu menyejahterakan para pedagang dengan pemeliharaan yang profesional dari pihak pemerintah daerah sehingga secara kualitas pelayanan bagi konsumen dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang ada di wilayah Kota Probolinggo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dalam penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Baru Kota

Probolinggo, Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Baru Kota Probolinggo, UPTD Pasar Baru Kota Probolinggo, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo, masyarakat konsumen Pasar Baru Kota Probolinggo, dan para pemerhati layanan publik di Kota Probolinggo. Data primer yang digali diambil melalui observasi dan wawancara.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain (tidak berhubungan langsung dengan obyek penelitian). Data sekunder ini meliputi studi pustaka, laporan-laporan, majalah, dan artikel serta publikasi ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder sangat penting untuk kelanjutan sebuah rancangan penelitian, karena dari data sekunder tersebutlah penelitian bisa diketahui apakah sebuah penelitian dilanjutkan atau tidak. Dengan kata lain bahwa data sekunder menjadi sebuah titik awal dari sebuah penelitian yang akan diperdalam melalui pencarian data primer.

Lebih jauh disarankan oleh Kotler & Lee (2007:286) bahwa agar memulai riset dengan ragam data sekunder yang barangkali tersedia untuk menentukan apakah dapat mendapatkan wawasan dan informasi tanpa harus memperoleh data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen dan informasi yang telah tersedia sebelumnya yang antara lain diperoleh dari arsip berbagai dokumen kebijakan yang telah dilakukan

oleh pemerintah Kota Probolinggo dalam pengembangan pasar-pasar tradisional.

3.5. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1235). Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Baru dan bangunan pasar Baru Kota Probolinggo.

2. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989: 622). Menurut Supranto (2000:21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Anto Dayan (1986:21), obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Dengan berdasar pada definisi obyek penelitian tersebut sehingga obyek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan pasar Baru Kota Probolinggo. Dengan adanya pengelolaan yang lebih terarah sesuai dengan prinsip good governance dengan mengedepankan public management diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas Pasar sebagai prasarana perekonomian warga Kota Probolinggo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan mempelajari literatur-literatur, karya ilmiah, dokumen serta sumber data lainnya yang telah dibukukan dan berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini studi kepustakaan akan mempelajari apakah sudah pernah ada kebijakan pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan pelayanan kepada para pedagang Pasar Baru dan sejauh mana telah dilakukan upaya tersebut.

Data-data tersebut akan digali dari berbagai instansi SKPD terkait sehingga ditemukan berbagai sumber data yang terkait dengan pengelolaan pasar tradisional yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data dari lapangan sebagai bahan analisis untuk dapat ditarik kesimpulannya maka ditempuh melalui beberapa cara, yaitu :

- Observasi

Merupakan suatu pengamatan yang sistematis, yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indra atau nalar, terutama dalam mengamati dan menafsirkan gejala-gejala yang ada dan berhubungan dengan objek penelitian.

Tahap ini telah dilakukan sejak dini sebelum penyusunan proposal ini dan telah memperoleh beberapa data pengantar yang mendorong disusunnya rancangan penelitian yang berkaitan dengan pentingnya redesain bangunan fisik Pasar Baru Kota Probolinggo dalam rangka pemberdayaan Pasar tersebut di tengah menjamurnya Pasar Modern.

Selain itu penelitian nantinya akan mengembangkan observasi lebih dalam dan lebih cermat sehingga dapat menemukan berbagai fenomena terkait pentingnya pengelolaan pasar tradisional Kota Probolinggo.

- Wawancara

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan informan guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Terkait dengan penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada para stakeholder, baik para pedagang, pengurus paguyuban, pihak pemerintah daerah maupun instansi pengelola Pasar Baru Kota Probolinggo dan masyarakat konsumen atau pelanggan Pasar Baru Kota Probolinggo.

- Informan

Penentuan informan untuk memperoleh data yang berasal dari nara sumber dengan cara *purposif* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai kebutuhan selama proses penelitian. Pemilihan cara penentuan informan ini terkait dengan

peran masing-masing informan dalam pengelolaan pasar. Karena masing-masing pihak diasumsikan memiliki peran dan wewenang masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya.

Adapun sumber informan dalam penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Baru Kota Probolinggo, Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Baru Kota Probolinggo, UPTD Pasar Baru Kota Probolinggo, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo, masyarakat konsumen Pasar Baru Kota Probolinggo, dan para pemerhati layanan publik di Kota Probolinggo.

- Focused Group Discussion

Focused Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini direncanakan sebuah FGD yang melibatkan perkumpulan pedagang pasar atau yang dikenal sebagai Paguyuban Pedagang Pasar dan pihak CSR yaitu Danamon Peduli.

3.7 Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kesimpulan. Peneliti juga akan melakukan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk bisa memperoleh data yang valid.

Setelah data tersebut diolah selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisisnya secara seksama dan menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran yang dapat diberikan kepada unit pengelola pasar atau langsung kepada Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada pedagang pasar Baru dan para konsumennya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa :

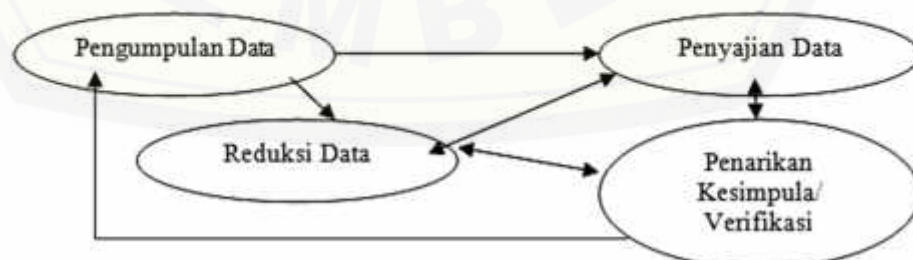
- 1) Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh dilokasi penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama

proses penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

- 2) Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, dan setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama berlangsungnya penelitian.

Gambaran alur Analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman adalah sebagaimana pada bagan berikut ini:

Gambar 3.1
Analisa Data "Model Interaktif"



Sumber: Milles&Huberman, (1992:20)

3.8 Pengujian Kredibilitas Data Hasil Penelitian

Untuk menjamin keabsahan data hasil temuan penelitian ini, perlu dilakukan pengujian data. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini akan ditempuh dengan dua cara yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

1. Triangulasi Metode

Menurut Patton (1987:329 dalam Bungin, 2014:215), triangulasi metode dilakukan dengan cara pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Secara teknis, Bungin (2014:265) menunjukkan cara triangulasinya yaitu dengan mengecek apakah informasi hasil interview sama dengan metode observasi atau apakah informasi hasil observasi sama dengan hasil interview.

Selain itu, menurut Moleong (2006:331, Bungin, 2014:265), triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek beberapa sumber data dengan metode yang sama, yaitu apakah sumber data ketika diwawancarai dan diobservasi memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda, maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu yang bertujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

2. Triangulasi Sumber Data

Menurut Patton (1987 dalam Bungin, 2014:265), triangulasi sumber data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Hasil perbandingan tersebut diharapkan berupa kesamaan atau alasan terjadinya perbedaan (Moleong, 2006:330, Bardiansyah, 2006:145 dalam Bungin, 2014:265). Selain itu, triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan cara melibatkan informasi (Bungin, 2014:265). Caranya adalah sebagai berikut :

- 1) Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden
- 2) Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data
- 3) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela
- 4) Memasukkan informan dalam kancah penelitian dengan cara

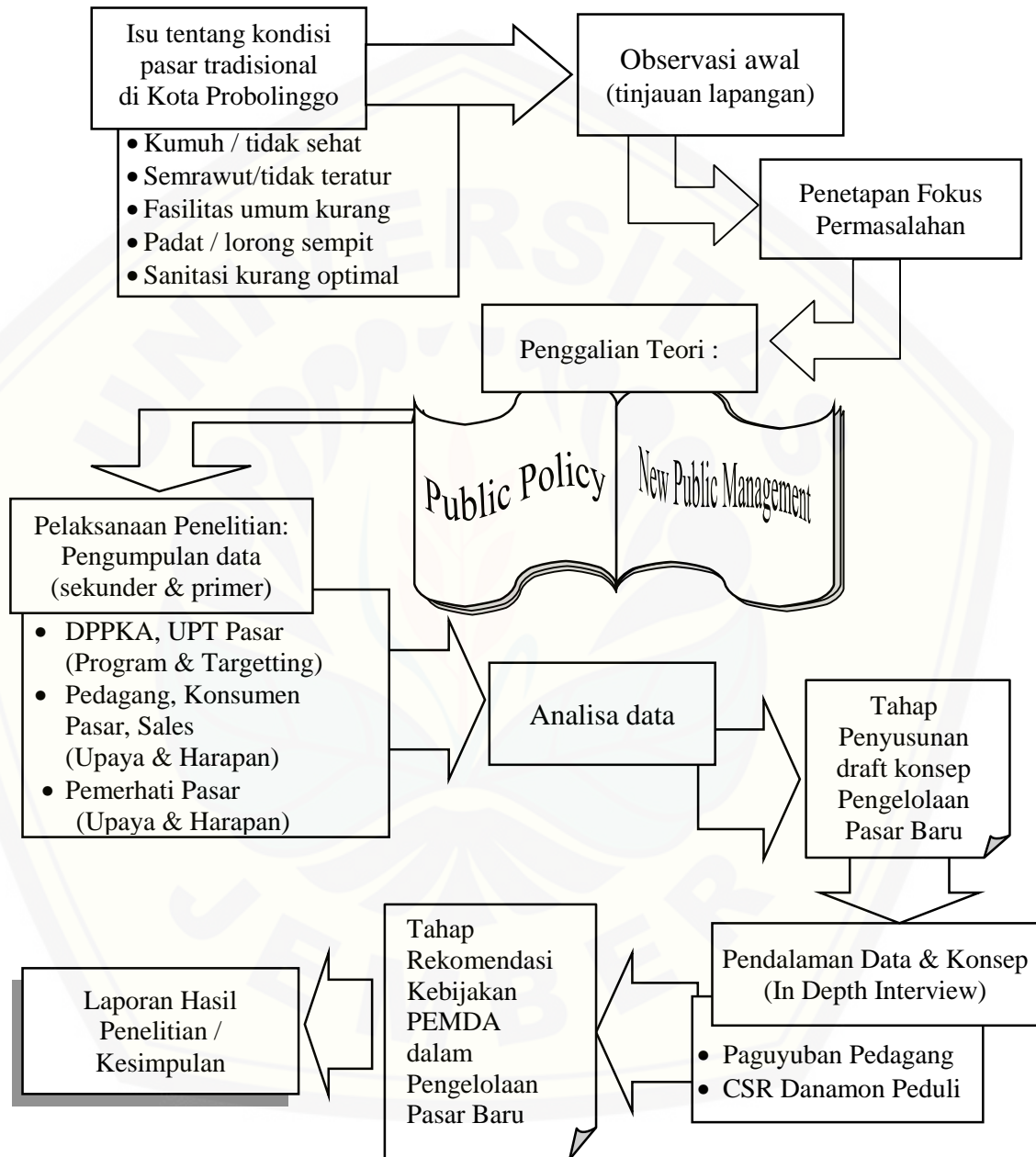
menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data.

- 5) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan (Moleong, 2006:335 dalam Bungin, 2014:265)



3.9 Alur Penelitian

Gambar 3.2 Alur Penelitian



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh selama penelitian dan telah dipaparkan pada Bab IV serta hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sebagaimana dirumuskan dalam Bab I yaitu Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam upaya memberikan solusi terbaik atas pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Probolinggo, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Probolinggo masih perlu meningkatkan perannya dalam peningkatan pengelolaan pasar Baru mengingat:

1. Adanya urgensi peningkatan kebersihan lingkungan pasar
2. Adanya urgensi penataan ulang perparkiran untuk mengatasi kemacetan
3. Adanya urgensi revitalisasi fisik bangunan sehingga tampang fisik gedung layak nya pasar modern.
4. Adanya urgensi revitalisasi arsitektur tata letak pasar yang komprehensif

5.2. Saran

Sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan penelitian ini bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif kebijakan sebagai solusi pengelolaan pasar tradisional kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah kota Probolinggo segera melakukan revitalisasi bangunan secara menyeluruh.
2. Hendaknya revitalisasi fisik bangunan pasar dilakukan secara umum sehingga dapat menjadikan performan pasar tradisional pasar Baru memiliki profil sebagaimana pasar swalayan modern.
3. Hendaknya dalam penataan ulang, agar Pemerintah Kota Probolinggo memberikan ruang parkir yang cukup.
4. Diharapkan adanya sistem penataan interior yang komprehensif sebagaimana pasar modern dengan tetap tidak membebani kepada pedagang demi kesejahteraan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Djumantri, 2010. *Pasar Tradisional, Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan*. *Buletin Tata Ruang*, Juli-Agustus 2010. *E-Jurnal*. Universitas Samratulangi. Manado.
- Falianti, 2011. *Desain Kebijakan Publik Dalam Menghadapi Krisis Global*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2011
- Febrianty, Dessy. 2013. *Model of Role Strengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia: Study Case Beringharjo Market*, Jogjakarta. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.4, No.5, 2013 www.iiste.org.
- Girindrawardana, Danang, ---. *Public Services Reform in Indonesia*. Ombudsmen Republik Indonesia. Jakarta.
- Goleman Daniel, Boyatzis Richard, Mckee Annie, 2006. *Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*. P.T. Gramedia Media Utama. Jakarta.
- Kasim, Azhar.-. *Public Policy*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2011. *Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial*. Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.
- Kim, Heung-Ryel, 2015. *Culture and Tourism-Oriented Local Traditional Market Strategies in Korea*, MokWon University, Korea.
- Kosasih, 2014. *Pasar Tradisional: Ruang Publik yang Makin Terpinggirkan*. *Jurnal Ilmiah*, UPI Bandung.
- Kotler dan Lee, 2007. *Pemasaran di Sektor Publik*. PT. Indeks. Jakarta.
- Mairizon dan Kiswanto, 2013. *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Publik*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1999. *Ekonomi Publik*.BPFE, Yogyakarta.
- Mangeswuri dan Purwanto, 2010. *Revitalisasi Pasar Tradisional Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 1, Desember 2010.

- Monoarfa, H, 2012. Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/891>.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Agus. 2015. *Mengenal Kebijakan Publik*. Pusdiklat Kemenkeu. Jakarta.
- Paskarina, Mariana, Atmoko. 2007. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung*. Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung.
- Prastyawan, Suryono, Soeaidy, Muluk. 2015. Revitalization of Traditional Markets into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory (Studies on Revitalization Wonokromo Market in Surabaya). *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*. Volume 20, Issue 9, Ver. IV. <http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol20-issue9/Version-4/A020940106.pdf>.
- Rudianto, Yayan. 2005. Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan. *Jurnal Madani* Edisi II/November 2005.
- Seran, Marcel, 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan*. MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Makasar.
- Starkey, Phyllis, et.al. 2009. *Paper Conference:Market Failure?: Can the traditional market survive?* House of Commons London, London.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Susilo, 2011. Dampak Operasi Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekalongan. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. journal.unikal.ac.id.
- Thamrin, Mahandis Y. 2013. *Petualangan Melancong Pasar Zaman Mataram Kuno*. National Geographic Indonesia.
- Tjokrowinoto. 2001. *Birokrasi Dalam Polemik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Wahyono, Budi. 2015. Sistem dan Komponen Kebijakan Publik. www.pendidikanekonomi.com.

- Wicaksono, Harsasto, Astuti.2013.Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies* Volume 2, Nomor 4,Tahun 2013.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta.
- Wainwright, Hilary. --. *Tragedi Privatisasi Potensi Publik*. Public Services International dan Transnational Institute. Voltaire CedexFrance.
- Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- , 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan*.
- , 2007. *Perpres No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- , 2011. *Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern*.
- , 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN 1

Rangkuman Tanya Jawab dengan Pengelola (DPPKA dan UPT Pasar Baru)

1. Permasalahan apa saja yang muncul terkait dengan :
 - Persaingan Pasar Tradisional dengan Pasar Modern,
 - Pembangunan pasar,
 - Dukungan pemerintah terhadap pembangunan pasar,
 - Manajemen pengelolaan pasar,
 - Keseimbangan pendapatan retribusi dengan biaya operasional dan pemeliharaan pasar,
2. Apa saja kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemkot Probolinggo untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut ? dalam bentuk Perda, SK Walikota atau lainnya ?, seperti aturan main antara memberi peluang pasar modern berkembang dengan dukungan terhadap pasar tradisional, peningkatan pelayanan kepada konsumen pasar tradisional/pebelanja ?
3. Bagaimana hasil retribusi pasar ? Bagaimana kondisinya dibanding biaya / pengeluaran operasional dan pemeliharaan pasar sebelumnya dan saat ini?
4. Apa saja bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepala UPT Pasar Baru terhadap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan dan prasarana pasar tradisional ? Seperti agar jalan / lorong tidak terasa sempit lantaran pedagang menempatkan barang dagangannya memakai badan lorong?, tempat jualan ikan dan daging tidak becek ? WC selalu bersih, sampah dapat dikelola dengan baik dan bersih, tempat parkir dapat berfungsi tertib dan optimal serta pedagang kaki lima menempati tempat berjualannya dengan tertib, rapi dan bersih ?
5. Apa saja yang dilakukan kepala pasar terhadap pedagang kios, lapak, dan pedagang kaki lima agar kondisi tempat mereka berdagang lebih baik, usaha pedagang dan pelanggan lebih meningkat dan pelayanan yang diberikan kepada pebelanja dapat lebih memuaskan ?

6. Apakah kepala pasar melakukan hal berikut ini : Memantau secara periodik permasalahan pasar, menanyakan keluhan pedagang, meminta masukan dari pedagang, memberikan arahan kepada pedagang untuk meningkatkan kinerja pelayanan pasar kepada para pebelanja, memberikan pelatihan kepada pedagang dan lainnya? Minta penjelasan.
7. Apa hambatan dan dukungan yang dialami dan didapat dalam mengelola pasar agar supaya pasar tetap disukai pebelanja dan semakin ramai ?
8. Apakah tidak perlu rehabilitasi/renovasi/revitalisasi fisik bangunan agar nampak seperti pasar modern?
9. Menurut Bapak/Ibu bagaimana relevansi implementasi kebijakan publik, sebagaimana trend di berbagai pemerintahan daerah lain yang menggunakan model Public Policy, yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye, dan juga implementasi kebijakan publik dengan model New Public Management?
10. Apa saja bentuk upaya Bapak, dalam penerapan prinsip-prinsip yang relevan dengan kedua model tadi yaitu Public Policy dan New Public Management?

Hasil Wawancara: (12 Okt. 2016)

1. UPT: “iya pak, memang luar biasa, sy juga ndak faham bagaimana perijinan bisa diperoleh dengan mudah untuk mendirikan swalayan dengan jarak yang begitu berdekatan, dan masuk di perkampungan. Nah ini yang akhirnya juga sangat berpengaruh besar kepada pelanggan pasar tradisional seperti pasar Baru ini”

T: Apakah sudah punya data berapa % pengurangan pelanggan stlh adanya pasar modern?

UPT: “memang belum punya pak, tapi pada produk2 tertentu pasti banyak berkurang yang beli di pasar gini/tradisional maksud saya”

T: Pembangunan Pasar?

DPPKA: “terkait dengan pembangunan pasar ini memang sudah ada wacana, dan sudah ada pendekatan-pendekatan kepada para

pedagang tentang usulan-usulan apa, harapan apa dan dari pemerintah daerah juga sudah mulai diagendakan. Permasalahan yang muncul, adanya keraguan para pedagang tentang lokasi sementara dan biaya sewa yang nantinya akan dikenakan kepada mereka”

2. DPPKA : “kalau tentang kebijakan, kita sudah membuat regulasi pengaturan bagaimana pasar modern harus didirikan, bagaimana kewajiban-kewajibannya, dan bagaimana harus melibatkan pelaku usaha tradisional dsb., itu sudah ada sejak tahun 2011 dalam bentuk Peraturan Daerah”
3. UPT: “sebenarnya kalau retribusi sudah cukup untuk skala rendah ya pak, tapi menurut saya perlu ditingkatkan karena toh para pedagang masih mau kalo misalnya dinaikkan besaran rupiahnya. Tapi kan ini menjadi kebijakan walikota pak”
“kalau dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan tentu masih kurang lah”
4. Kepala UPT : “banyak upaya, seperti mensosialisasikan melalui pertemuan dengan paguyuban, sosialisasi melalui poster, tulisan, melalui radio land, patroli, dsb. Namun demikian namanya pedagang itu banyak juga yang masih blm sadar, akhirnya masih ada saja yg jualan di lorong”
5. Kepala UPT: “untuk memperbaiki pelayanan untuk mereka kita rencanakan renovasi, namun waktunya belum dapat dipastikan. Masih dalam taraf wacana pak. Mudah2n bisa segera dilakukan”
6. Kepala DPPKA : “Iya, kita sering dialog dengan berbagai pihak, ya pedagang, ya pengurus paguyuban, pembeli, tokoh masyarakat peduli pasar, dan banyak pihak lain. Yang intinya kita ingin ide yang cocok dan bisa diterapkan di pasar ini”

7. (Bpk Yusuf, UPT Psr Baru) “Hambatannya, antara lain pedagang yang kurang rajin menempatkan sampah dengan benar, keinginan pedagang yang melebihi kemampuan kita sebagai pengelola, keterbatasan sumber dana.

Kalau dukungannya juga cukup baik, meski banyak pedagang yang kurang peduli dengan kebersihan, namun banyak juga yang saling memberi contoh dan memperlakukan sampah dengan benar. Pengurus paguyuban juga intens dalam mendorong para anggotanya agar tetap menjaga kebersihan pasar”.

8. (Bpk Taufik, DPPKA) “Dalam rangka pemeliharaan, tentunya kita selalu memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan para pedagang, sebisa mungkin, karena kemampuan kita terbatas, meskipun harapan para pedagang sangat baik. Namun kita sudah sering diskusi dengan para pedagang melalui paguyubannya, dengan para pengurusnya atau langsung saat pertemuan-pertemuan”
9. (Ibu Diah S., DPPKA) “Kita sudah melakukan berbagai langkah antisipatif dan koordinatif dengan mengacu pada prinsip Public Policy maupun New Public Management yang memang dua-duanya sebenarnya secara otomatis sudah menjadi tuntutan dalam pembangunan era sekarang dalam hal ini pengelolaan pasar tradisional pasar Baru yang sedang kita tata ini.”
10. (Ibu Diah S.) “Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk itu, antara lain: pertemuan dengan paguyuban pedang pasar membicarakan tentang ide-ide penataan ulang pasar dan renovasi pasar. Juga telah beberapa kali dilakukan musyawarah sekaligus meminta pendapat-pendapat atau keinginan apa yang diharapkan oleh para pedagang”

“Itu yang relevan dengan Public Policy, sedangkan yang relevan dengan penerapan New Public Management, kita memegang beberapa prinsip NPM dalam perencanaan dan tata kelola pasar Baru pada khususnya dan semua pasar tradisional yang kita miliki pada umumnya. Misalnya, prinsip Pemerintahan Yang Berorientasi Pelanggan, Pemerintahan Wirausaha, Pemerintahan Antisipatif dan lain-lainnya, ini semua sudah kita lakukan”.

(Kepala DPPKA) “di pasar tradisional yang ada di kota Probolinggo telah dibentuk paguyuban pedagang di masing-masing pasar tersebut sehingga dalam pengambilan kebijakan selalu melibatkan anggota paguyub

Rangkuman Wawancara dengan Dinas Terkait lainnya (DISHUB)

(4 Desember 2016)

1. Gangguan lintas – jalan macet
Ini memang masalah klasik yang terjadi di hampir semua pasar tradisional. Dimana-mana demikian. Penyebabnya salah satunya, ya, salah satunya, adalah karakter masyarakat di pasar yang cenderung g tertib. Kedua, memang lokasi kurang tertata.
2. Ketertiban parkir
Ketertiban, Tertib artinya sesuai dengan aturan, sebenarnya sudah tertib, karena ada petugas parkir yang memandu. Tetapi ya namanya masyarakat itu masih belum berpikir sistematis, jadi banyak yang parkir depan belakang, akhirnya susah bagi yang depan mau keluar.
3. Pengendalian oleh petugas
“setiap pagi kami sudah menerjunkan petugas penertiban lalulintas di jalan Panglima Sudirman pak. Tetapi memang begitu banyaknya pengunjung pasar dan ramainya jalur itu maka kemacetan belum teratasi. Apalagi di ruas jalan Siaman, terlalu banyak kendaraan yang bongkar muat di jalan itu. Maka menurut hemat kami memang perlu renovasi fisik pasar sehingga diupayakan bagaimana agar parkir dapat disediakan lahan khusus yang terpadu dengan pasar” (Bpk Dedy, Dishub kota Probolinggo)
(4 Desember 2016)

LAMPIRAN 2

RANGKUMAN TANYA JAWAB DENGAN PEDAGANG:

- 1 Keamanan pasar cukup terjamin
Kemanannya bagus. Terjamin.
- 2 Pasar ini cukup nyaman
Nyaman pak. Dinyaman-nyamankan. Wong adanya juga begini. Yaa kalo bisa sih diperbaiki biar saya bisa jualan dengan enak, bisa leye-leyeh klo pas capek gitu.
- 3 Pembeli cukup banyak
Pembelinya ya pas pasan lah pak. Ada, meskipun ga sesuai harapan tiap hari.
- 4 Lingkungan pasar cukup bersih
Kurang bersih pak. Tempat pembuangannya dan yang ngurus sampah ini kurang baik.
- 5 Pengelompokan pedagang cukup tertata
Kalo itu kurang tau saya pak. Soalnya saya cuma jualan gitu aja.
- 6 Pengelola cukup koordinatif dengan para pedagang
“Meskipun masih ada hal penting yang belum dilaksanakan oleh pemkot, tetapi kami setidaknya sudah sering bicara bersama dalam berbagai hal tentang pasar Baru ini. Dan sikap pemkot itu tentu harus terus dijaga, karena kami sebagai pelaku pasar istilahnya, sangat ingin apa yang diputuskan oleh pemkot tidak bertentangan dengan keinginan kami yang berdagang di pasar ini, kan gitu pak” (Rizal, pedagang) – 19 Okt 2016
- 7 Persaingan pedagang cukup sehat
Persaingannya ya begitulah pak. Ga tau lah mau bilang apa.
- 8 Air bersih tersedia cukup memadai
Ndak pak. Kurang. Klo perlu masih harus ke sana kamar mandi.
- 9 Saluran limbah cukup lancar
Saluran gotnya kurang baik kayaknya pak.

- 10 Lorong jalan bagi pengunjung cukup bagus dan bersih
Lorong jalannya tidak bersih, kotor jorok
- 11 Keindahan pasar terjaga
Bukan terjaga pak, ndak indah. Sebel lihatnya.
- 12 Luas tiap loss cukup memadai
Kurang, saya saja nih lihat dagangan saya numpuk gini.
- 13 Pelayanan pengelola kepada pedagang cukup memuaskan
“Ya, kami memang sangat ingin terlibat dalam berbagai penyusunan kebijakan pengelolaan pasar ini, karena kami sebagai pengguna, jangan sampai kebijakan pemerintah daerah merugikan kami para pedagang yang berjualan di sini” (H. Purnomo) – 19 Okt 2016

“Alhamdulillah, selama ini kami melalui Paguyuban sering diajak bicara dan diskusi tentang pasar oleh UPT, jadi kami bisa menyampaikan keinginan kami agar pasar ini lebih baik”. (S. Mito) – 27 Okt 2016

Pelayanannya lumayanlah. Apalagi dengan adanya Radio di pasar yang siarannya dapat didengar khusus oleh masyarakat pasar, maka banyak informasi dapat diterima lebih cepat secara bersama-sama oleh para pedagang” (Bu Maryah) – 27 Okt 2016
- 14 Pengelola cepat tanggap pada keluhan pedagang
Biasa lah. Kadang ditanggapi kadang ndk.
- 15 Perlu patroli pengamanan rutin
Klo ada sih lebih bagus, agar tertib
- 16 Banyak pembeli menjadi pelanggan / bukan sekali beli
Klo pelanggan ada, tapi yang gitu pas pasan itu. G banyak. Mereka kembali beli ke saya kalo dapat yg harga murah. Tapi saya yang g dapat untung banyak..dapatnya akhirnya mepett.

- 17 Pasar ini perlu rehabilitasi fisik karena arsitektur yang sudah tidak sesuai kebutuhan
Perlu sekali, saya pingin yang bagus pak.
- 18 Kondisi luar pasar cukup nyaman
“Kita ini kan juga pengguna jalan ya pak, jadi kita pedagang di pasar sini, klo macet akhirnya mau ambil barang apa gitu, mestinya harus cepat-cepat, malah terhambat macet. Ini yang harusnya di tata ulang pak”.
(Biyo) – 4 Nop 2016
- 19 Kondisi fasilitas umum dalam pasar terawat dan bersih
Ya gitu lah.
- 20 Lokasi bongkar muat barang memudahkan pedagang
Susah pak. Macet. Berjube.
- 21 Tarif sewa loss terjangkau dan menguntungkan pedagang
Terjangkau. Tapi ya jangan kemudian nanti dinaikkan.
- 22 Situasi pasar bebas dari pungutan illegal / tidak ada pungutan liar
Pungutan saya rasa tidak ada

LAMPIRAN 3

RANGKUMAN TANYA JAWAB DENGAN PELANGGAN PASAR:

- 1 Keamanan pasar ini terjamin
Kalau tentang keamanan insya allah terjamin pak. Bagus lah
- 2 Pasar ini cukup nyaman
“Menurut saya, kurang nyaman pak, bahkan tidak nyaman sama sekali. Kalau bisa sampaikan ke pemkot,....tolong diusahakan dataran pasar ini dibuat agar air dapat mengalir lancar, jadi kalau hujan tidak becek, dan orang belanja akan semakin senang, nyaman, krasan. Kalau yang belanja merasa nyaman, meskipun awalnya dari rumah tidak ingin beli sesuatu akan berubah jadi melihat-lihat di dalam pasar sehingga akhirnya membeli barang-barang tambahan lain, sehingga pedagang yang diuntungkan”
(Paryoto, Sales). – 7 Nop. 2016

“kondisi pasar saya rasa kurang nyaman, banyak sampah berserakan, saluran air ndak jalan dan ada beberapa bagian jalan yang becek”
(Dzolifah) - 7 Nop. 2016
- 3 Kondisi bangunan pasar perlu rehabilitasi
Perlu sekali pak. Coba aja bapak lihat banyak lantai rusak, saluran air tersumbat. Penempatan sampah ndak teratur dan sebagainya.
- 4 Penataan / pengelompokan barang dagangan mudah ditemukan
Saya rasa pengelompokan sudah ada, Cuma saja masih banyak pedagang yang jual dagangan tidak sesuai tempatnya. Buah, sayuran banyak yang di bawah apalagi juga ada yang di lorong, akhirnya mengganggu.
- 5 Ruang / jalan bagi pengunjung/pembeli cukup memudahkan
Waah, mengganggu sekali pak. Masa lorong yang seharusnya untuk hilir mudiknya pedagang dan pengunjung malah untuk jualan. Susah jadinya untuk lewat. Ini perlu tindakan aparat petugas.

- 6 Pelayanan pedagang memuaskan
Yaa kalo para pedagang itu sih, macam-macam ya pak. Wong namanya manusia, banyak yang beda sikapnya. Kadang ada yang baik, santun. Tapi banyak juga yang acuh tak acuh. Sepertinya mereka g butuh pembeli, kaya gitu juga banyak. Kalo ditawar, sewot. Nah pedagang kaya gitu mestinya berubah.
- 7 Fasilitas Umum pasar cukup memadai
Fasilitas umumnya ada meskipun belum bagus.
- 8 Lingkungan pasar cukup bersih
Waaah kalo kebersihan ini yang sulit pak. Singkatnya kalo saya bilang tidak bersih, kotor pasar ini. Masa sampah di tempatkan di tangga menumpuk kaya gitu. Gimana coba itu pak.
- 9 Harga-harga barang sangat terjangkau sesuai kualitas
Harga barang cukup baik, sesuai dengan mutu masing-masing lah pak. Makanya saya juga lebih suka belanja di pasar sini.
- 10 Jalur pengangkutan barang dagangan tidak mengganggu pembeli
sangat terganggu, tidak lancar, karena banyak pedagang jualan di pintu masuk
- 7 Nop. 2016
- 11 Penampilan luar gedung pasar menarik
Ndak pak. Kurang menarik. Kelihatannya tuh lusuh gitu lo pak. Gelap, ndak ada pancaran dari jauh tuh ndak ada. Coba dibanding dengan mall-mall itu jauh banget bedanya. Makanya orang yang mau belanja kan kurang merasa mantap gitu. Karena jaman sekarang lebih pada penampilan pak....meskipun itu memang ga penting, tapi gimana nama nya orang daya tariknya juga berbeda.
- 12 Tempat parkir sudah baik
Walaah klo masalah tempat parkir sama sekali tidak baik pak. Masih harus nyeberang jalan itu loh pak. Klo sudah kendaraan ruame gitu, bikin lama mau nyeberang.

- 13 Arus pengunjung di luar pasar ke pintu masuk teratur
Klo teratur ya teratur pak, cuma masalahnya kan berjubel, ada yang jualan di pintu gerbang dan dilorong. Akhirnya gimana ya mempersempit jalan masuk. Apalagi klo bawa barang waaahhh susah pak.
- 14 Pengelolaan sampah sudah baik
Ndk pak. Sangat tidak baik. Saya sebel juga melihatnya, masa banyak sampak tercecer, terutama di atas, sampah dibuang di tangga, numpuk di sana pak.
- 15 Saluran limbah dalam pasar sudah baik
Salurannya kurang lancar pak, malah terlihat kemasukan sampah di sana.
- 16 Anda merasa lebih memilih ke pasar ini dari pada ke swalayan modern
Klo ngikuti nafsu gitu ya pilih ke pasar modern pak, enak bersih cepet lagi. Tapi kalo ingat harga ya tetap pilih belanja di pasar sini.
- 17 Keberadaan radio di pasar penting untuk penyebaran informasi
Radio pasar ini saya kira penting lah. Klo ada barang hilang, dapat disiarkan gitu biasanya. Kalo ada pengumuman lngsung disampaikan ke masyarakat pasar. Bagus itu pak.

Jadi, dengan adanya Radio di pasar yang siarannya dapat didengar khusus oleh masyarakat pasar, maka banyak informasi dapat diterima lebih cepat secara bersama-sama oleh para pedagang. (Bu Sati) - 7 Nop. 2016
- 18 Perlu patroli pengamanan oleh pengelola pasar
Sangat perlu, krn klo yang mengingatkan sesama pedagang akan terjadi perselisihan, akhirnya sama-sama gak nyaman (Maryam) – 21 Nop. 2016
- 19 Perlu penambahan ruang parkir
Perlu sekali, ini sudah terlambat harusnya sudah dari dulu di perbaiki, faktanya macet tiap hari. (Rusmi) - 21 Nop. 2016
- 20 Perlu peningkatan kebersihan layaknya swalayan modern
Sangat mengharapkan seperti pasar swalayan yang bersih, terang, nyaman, enak, agar belanja bisa cepat dan gampang (Taniah) - 21 Nop. 2016

LAMPIRAN 4

RANGKUMAN TANYA JAWAB DENGAN PEMERHATI PASAR:

1. Keamanan pasar ini terjamin
Menurut saya kalau masalah keamanan sudah baik, tidak ada gangguan.
2. Pasar ini cukup nyaman
Belum, belum pak. Nyaman itu juga menyangkut kebersihan dan keindahan juga ketertiban kan.
Jadi belum nyaman, karena ketiganya masih belum terpenuhi.
3. Pasar ini perlu rehabilitasi fisik karena rusak
Ooo iyya. Rehabilitas fisik dalam arti penataan ulang baik interiornya maupun arsitekturnya.
Agar apa, biar masyarakat itu senang dan merasa ketagihan belanja di pasar ini. Artinya bukan ketagihan belanja, tetapi ketagihan ke pasarnya tidak ke tempat lain atau pasar swalayan modern itu.
4. Pasar ini perlu rehabilitasi fisik karena arsitektur yang sudah tidak sesuai kebutuhan
“Menurut saya, pasar Baru ini harus ditata ulang bangunannya, layoutnya lah, perlu dibangun bertingkat kemudian parkir diberi lahan di lantai dasar sehingga tidak lagi membuat macet jalanan seperti sekarang ini. Kalau masalah naik ke lantai atas, kan bisa dibuatkan tangga lift atau eskalator lah, untuk meringankan pedagang dalam angkat dagangan, jadi membuat pedagang lebih terlayani, sejahtera gitu kan pak” (Martan, pemerhati) – 8 Nop. 2016
5. Perlu kenaikan tarif retribusi pasar
Kalau retribusi jangan dinaikkan lah, ditertibkan aja. Saya masih khawatir retribusi ini ada yang belum tertib, terutama di perparkiran.
6. Performa fisik bangunan pasar representatif
Walahhh. Jauh pak. Representatif itu kan kalau sudah seperti hypermart itu.

Coba bisa dibuat seperti itu, saya yakin masyarakat akan pilih ke pasar itu. Tapi ya kalau sdh dibuat seperti pasar modern jangan kemudian tarif sewa tempatnya di buat mahal. Akhirnya pedagangnya yang ga bisa jualan dengan harga kompetitif.

7. Perlu peningkatan performa fisik bangunan pasar

Sangat perlu. Penting karena pesaing pasar tradisional ini banyak pasar modern yang nyaman.

8. Fasilitas umum pasar sudah memadai

“Belum memadai ... ada tiga hal yang menurut saya belum terselesaikan di pasar Baru ini pak. Yang pertama jumlah los atau lapak yang masih kurang, yang kedua banyaknya pedagang yang berjualan di lorong access yang mestinya tidak ada gangguan untuk keluar masuknya orang dan barang, yang ketiga perparkiran yang selama ini sangat tidak nyaman, karena membuat lalu lintas di jalan protokol dan jalan Siaman itu macet. Ini sangat mengganggu kenyamanan bagi pengunjung dan masyarakat, akibatnya jumlah pembeli bisa jadi berkurang karena malas akibat macetnya kendaraan. Naah kalau sudah begitu, pada gilirannya pasti pedagang yang dirugikan, karena pembeli berkurang, padahal sebenarnya jika pasar nyaman akan makin senang masyarakat belanja di pasar Baru” (Pak Djoko, pemerhati pasar tradisional) 14 Nop. 2016

9. Kondisi pasar sudah memiliki daya tarik bagi masyarakat

Daya tarik sudah, tapi setinggi apa kan gitu pak. Klo daya tariknya karena hanya harga murah, dan itu hanya mereka yang memang masyarakat yang kelompok pra sejahtera, kan ga bagus juga.

Artinya bahwa yang belanja hanya membeli kebutuhan pokok dan sedikit kuantitasnya.

Beda lo kalo yang tertarik adalah masyarakat sejahtera ke atas. Belanja tuh malah sesuatu yang kadang tidak penting karena mereka punya uang, ya kan.

Naah ini yang mestinya di perhatikan oleh pemerintah daerah. Bidik pembeli ini agar para pedagang banyak untung dan pemkot juga banyak dapat retribusi masuknya.

10. Pasar ini sudah mampu bersaing dengan pasar modern

Ya belum to. Mampu bersaing bagaimana wong lokasinya aja dilingkupi kemacetan, kondisi kumuh. Performan kurang grengg.

11. Pengelola sudah sering melibatkan berbagai stakeholder dan masyarakat dalam pengelolaan pasar

Kalau melibatkan sepertinya sudah ya. Informasinya sering ada pertemuan, ada konsultasi dan semacamnya.

12. Pelayanan pengelola sudah sesuai dengan tarif tetribusi

Saya kira kalo sesuai ya sesuai pak. Tetapi gini loh, pemerintah itu tidak hanya berkewajiban memberikan imbalan kepada masyarakat yang tingkatnya hanya sesuai yang mereka berikan. Tetapi, pemerintah itu wajib memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat. Memberikan kesejahteraan kpd mereka. Wong mereka itu pengurus masyarakat kok. Mengurus itu ya diurus kebutuhan fasilitas mereka supaya sejahtera, ndak usah dihitung kamu bayar berapa aku kasih apa, ya kan..

13. Masyarakat berharap keberadaan pasar dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak

“Betul pak. Jadi mestinya keberadaan pasar tradisional ini harusnya dapat menyejahterakan semua pihak, tentunya yang berhubungan dengan pasar itu. Sejahtera itu bukan hanya untung uang dan dapat barang, tapi perasaan terpuaskan juga. Kenyamanan itu termasuk kesejahteraan. Sebenarnya klo mau, pasar ini dapat ditingkatkan. Sangat mungkin dapat menyamai pasar modern. Dan itu legal sah kalo pemkot mau.

“Pemerintah Daerah kota Probolinggo ini sebenarnya telah memiliki dasar yang kuat jika mau memberdayakan pasar Baru sebagai pasar tradisional yang layak, baik ditinjau dari sisi kwajibannya untuk melindungi keberadaan pasar tradisional maupun untuk mempertahankan pasar

tradisional yang bahkan pasar Baru ini memiliki nilai historis yang memang harus dipertahankan nilainya sebagai bagian dari sejarah kota Probolinggo. Coba kita lihat ya, pada pasal 7 Peraturan Daerah kota Probolinggo tahun 2011 berikut ini:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.*
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :*
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;*
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;*
 - c. dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah melakukan;*
 - d. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;*
 - e. pemberian subsidi dan pinjaman lunak kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;*
 - f. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;*
 - g. pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;*
 - h. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan*
 - i. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.*

- (3) *Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;*
- (4) *Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.*

Nah, disitu sangat jelas, pada ayat (3)...tidak dapat diubah....kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih..dst..

Kemudian pada ayat (4),mengatur.....agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional” (Djalal, pemerhati pasar tradisional).

(13 Nop. 2016)

LAMPIRAN 5

***PERATURAN PRESIDEN NO. 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN
DAN PASAR MODERN***

LAMPIRAN 6

**PERMENDAG NO. 53 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENATAAN
DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN
DAN PASAR MODERN**

LAMPIRAN 7

**PERDA NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN,
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR
MODERN**

LAMPIRAN 8

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2016**

LAMPIRAN 9

STRUKTUR ORGANISASI UPT PASAR BARU KOTA PROBOLINGGO

LAMPIRAN 10

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PASAR BARU KOTA PROBOLINGGO
TENTANG PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR BARU**

LAMPIRAN 11

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PASAR BARU TENTANG SUSUNAN
KEANGGOTAAN PENGURUS PAGUYUBAN PASAR BARU**